

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi seringkali dianggap sebagai urusan yang tidak menjadi prioritas utama, sehingga sering termarginalkan dari urusan-urusan yang lain, namun seiring dengan tuntutan peningkatan standar kualitas hidup masyarakat, semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan.

Kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap penyehatan lingkungan dalam mendukung kualitas lingkungan perlu ditingkatkan. Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hidup bersih dan sehat yang tercermin dari perilaku masyarakat saat ini akan menjawab tantangan pembangunan sanitasi dalam RPJMN tahun 2015 – 2019 yaitu *Universal Access* cakupan akses 100% untuk air minum dan sanitasi dalam rangka pengamanan air minum.

Pentingnya pengelolaan air minum dan sanitasi untuk mencegah terganggunya kesehatan manusia dan pencemaran lingkungan, kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk ikut serta dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam rangka melaksanakan program tersebut telah membentuk Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 11 Januari 2016 melalui Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor: 56 Tahun 2016.

Mengingat kota/kabupaten Indonesia akan memerlukan waktu bertahun-tahun (*multi years*) untuk memiliki layanan sanitasi yang layak dan menyeluruh serta terkait dengan capaian target *Universal Access* di tahun 2019. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan akan melakukan pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2016 – 2019.

Strategi Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat kota/kabupaten. Dokumen ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten juga dibutuhkan sebagai pengikat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Guna menghasilkan Strategi Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan suatu kerangka kerja yang menjadi dasar dan acuan bagi penyusunan strategi sanitasi kota dengan tujuan agar strategi sanitasi tersebut, yang berupa rencana strategi berjangka menengah (5 tahun) memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat di implementasikan. Kerangka kerja tersebut diharapkan mampu mengatasi kesenjangan kemampuan Pemerintah Kota dalam menyediakan sarana dan prasarana sanitasi bagi masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana sanitasi tersebut, merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan agar mampu menyusun strategi untuk percepatan pembangunan sektor sanitasi. Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk mendanai program pembangunan merupakan salah satu faktor pendorong dalam menetapkan prioritas pembangunan.

Strategi Sanitasi Kota akan diterjemahkan ke dalam rencana tindak tahunan (*annual action plan*) yang berisikan informasi lebih rinci dari berbagai usulan program dan kegiatan pengembangan layanan sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang disusun sesuai tahun rencana pelaksanaannya.

Pada tahun 2012 POKJA Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah menyusun Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK). Dimana data pada tahun penyusunan dokumen – dokumen tersebut sudah tidak sesuai dengan eksiting sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dengan adanya Pemutakhiran Starategi Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data perencanaan sektor

sanitasi, dengan mengacu pada RPJMD dan RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Secara garis besar dokumen Pemutakhiran SSK berisi tentang rencana strategi dan rencana tindak pembangunan sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dapat menjadi informasi acuan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor : 07 Tahun 2012, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010 - 2015. Keterkaitan Pemutakhiran SSK dan RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam BAB III mengenai Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, dimana RTRW tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013. Disamping dokumen tersebut, pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sangat berkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik tingkat nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten. Oleh karena itu, Strategi Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disusun dengan memperhatikan keterkaitan, keselarasan, dan keterpaduan dengan berbagai dokumen yang dimaksud, dijelaskan sebagai berikut:

1. Memperhatikan RPJPN dan RPJMN dilakukan melalui penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan arah, kebijakan umum dan prioritas pembangunan nasional dan pembangunan kewilayahan.
2. Memperhatikan RPJPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara dilakukan melalui penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan kebijakan, strategi dan program pembangunan Provinsi Sulawesi Utara.
3. Berpedoman pada RPJMD dan RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan dengan: (1)penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka menengah daerah; dan (2) penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

4. Berpedoman pada Renstra SKPD terkait Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan dengan penyesuaian kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan rencana dan strategi SKPD.

1.2. Metodologi Penyusunan

Metode yang digunakan dalam pemutakhiran penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini adalah studi dokumen dan pengumpulan data sekunder yang ada di masing-masing SKPD terkait, dan didukung dengan observasi objek yang relevan serta disusun berdasarkan karakteristik daerah, kapasitas kebijakan, melibatkan sebanyak mungkin pelaku dari berbagai unsur dan kepentingan berdasarkan kemampuan riil daerah, kesepakatan masyarakat, kepentingan daerah serta aturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterlibatan masyarakat secara aktif pada tahap penyusunan merupakan upaya untuk meningkatkan kepedulian terhadap sanitasi serta sebagai upaya melakukan perubahan perilaku masyarakat secara bertahap. Kepedulian masyarakat tidak saja akan melahirkan kesadaran dalam memelihara prasarana dan sarana, tetapi juga dalam menjaga keberlanjutannya, baik kuantitas maupun kualitasnya serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Metode pemutakhiran penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Melakukan penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Menganalisa kondisi sanitasi yang ada saat ini dan permasalahan mendesak yang ada dalam pengelolaan layanan sanitasi yang meliputi: air limbah domestik, persampahan, drainase dan PHBS terkait sanitasi. Penentuan area berisiko sanitasi digunakan analisa kualitatif persepsi SKPD, analisa kuantitatif hasil studi EHRA, dan data sekunder.
- b. Melakukan penilaian terhadap kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Analisis kesenjangan digunakan untuk menentukan isu strategis dan kendala, tantangan serta hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan.

- c. Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan yang akan dituangkan kedalam visi dan misi sanitasi kota serta merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi dengan tetap mengacu pada RTRW dan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta dokumen perencanaan lainnya.
- d. Merumuskan strategi sanitasi kota yang menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kota jangka menengah 5 tahunan dengan menggunakan alat analisis SWOT.

Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) ini secara menyeluruh, akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan dalam penulisan ini yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sumber Data

- a. Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta.
- b. Narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat.

Untuk mendukung data sekunder tersebut juga dilakukan beberapa kajian terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti: Enviromental Health Risk Assesment (EHRA), kajian peran serta swasta dalam penyedia layanan sanitasi, kajian kelembagaan dan keuangan, kajian komunikasi dan media, kajian peran serta masyarakat, dan kajian sanitasi sekolah.

2. Pengumpulan Data

Proses seleksi dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Teknik kajian dokumen dipergunakan tim untuk mengkaji data. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini.

Pengumpulan data menggunakan berbagai teknik antara lain :

- Kajian Literatur
- Observasi / wawancara responden
- Forum Diskusi, lokakarya dan sebagainya

3. Jenis Data

- a. Data primer; yaitu data yang bersumber dari survey atau observasi lapangan yang dilakukan Pokja. Data primer dapat berupa rekaman hasil wawancara maupun potret/dokumentasi kondisi eksisting di lapangan.
- b. Data sekunder; yang diperoleh dari dokumen yang dimiliki tiap dinas/SKPD yang terlibat dalam Pokja Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara umum.

4. Metode Analisis

Metode Analisis yang digunakan dalam Penyusunan SSK Pemutakhiran yaitu:

- a. Diagram Sitem Sanitasi (DSS) digunakan untuk memetakan kondisi eksisting infrastruktur sanitasi (pengelolaan air limbah domestik, persampahan dan drainase lingkungan);
- b. Instrumen Profil Sanitasi merupakan alat bantu untuk menganalisis area beresiko berdasarkan tingkat resiko sanitasi serta tipikal sistem sanitasi (air limbah, persampahan, drainase) per kelurahan/desa berdasarkan input data umum maupun data khusus layanan sanitasi perkomponen di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- c. SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat). Metode ini mengkaji kondisi internal dan eksternal suatu organisasi/lembaga/entitas tertentu dari empat aspek yaitu: Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang/Kesempatan), dan Treat (ancaman);
- d. Kerangka Kerja Logis (KKL) menjelaskan alur dan keterkaitan atas program dan kegiatan yang diusulkan dengan strategi, tujuan dan sasaran, serta permasalahan yang dihadapi;
- e. Instrumen Perencanaan Sanitasi merupakan alat bantu untuk menganalisis perkiraan biaya sistem dan teknologi sanitasi yang dipilih berdasarkan input data umum dan biaya maupun data khusus mengenai system seleksi dan pemilihan teknologi setiap zona untuk komponen air limbah domestik, persampahan, dan drainase.

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional/pusat maupun daerah. Strategi Sanitasi Kota (SSK) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan didasarkan pada peraturan dan produk hukum yang meliputi :

Undang-Undang

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan badan layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2007 tentang Mutu Air Limbah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah (Air tanah harus dikelola secara terpadu, menyeluruh dan berwawasan lingkungan hidup);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Kawasan Industri;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Keputusan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Keputusan dan Peraturan Menteri Republik Indonesia

1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor Kep-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;
4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;
5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri;
6. Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 403 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs SEHAT);
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA);

9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Pemotongan Hewan;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan persampahan;
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M Tahun 2008 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852 Tahun 2008 tentang Kebijakan Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air Pada Sumber-Sumber Air;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank sampah;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

Peraturan Daerah

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 Tahun 2011, tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 25 Tahun 2015, tentang Retribusi Jasa Umum;
5. ***Peraturan Daerah tentang Sanitasi (Air Limbah, Persampahan dan drainase belum ada (status saat ini sementara pembahasan)***

Peraturan Bupati

1. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 73 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016;
2. Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor: 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun Anggaran 2016.

Surat Edaran Menteri

1. SE Mendagri Nomor 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
2. SE Mendagri Nomor 660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Di Daerah;

3. SE Menteri Kesehatan Nomor HK.0303/MENKES/184/2015 ttg pendanaan untuk upaya pelayanan kesehatan preventif di provinsi dan Kab/Kota.

Petunjuk Teknis

1. Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan;
2. Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos, Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah;
3. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.72 Pet B judul Petunjuk Teknis Pembuatan Sumur Resapan;
4. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih;
5. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan;
6. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah – pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik;
7. Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan;
8. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman;
9. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis Tata Cara Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kakus;
10. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis Saluran Irigasi;
11. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis MCK.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdiri dari 6 bab yang meliputi :

Bab 1 Pendahuluan

Berisikan latar belakang, metodologi penyusunan, dasar hukum, dan sistematika penulisan yang digunakan.

Bab 2 Profil Sanitasi Saat Ini

Dalam bab ini membahas gambaran wilayah, kemajuan pelaksanaan SSK, profil sanitasi saat ini, serta area berisiko dan permasalahan mendesak sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Bab 3 Kerangka Pengembangan Sanitasi

Membahas visi dan misi sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, pentahapan pengembangan sanitasi yang meliputi: tahapan pengembangan sanitasi; tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi; skenario pencapaian sasaran serta membahas kemampuan pendanaan sanitasi daerah.

Bab 4 Strategi Pengembangan Sanitasi

Berisikan penjelasan detail mengenai strategi pengembangan sanitasi yang meliputi: air limbah domestik, pengelolaan persampahan, dan drainase perkotaan.

Bab 5 Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi

Menyajikan program, kegiatan dan indikasi pendanaan sanitasi yang meliputi: air limbah domestik, pengelolaan persampahan, drainase perkotaan, dan PHBS terkait sanitasi baik pendanaan yang bersumber dari pemerintah dan non pemerintah maupun funding gap.

Bab 6 Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK

Memberikan gambaran umum struktur monev capaian strategi sanitasi kota meliputi: capaian stratejik, capaian kegiatan, evaluasi dan pelaporan monev implementasi SSK.

BAB 2

PROFIL SANITASI SAAT INI

2.1. Gambaran Wilayah

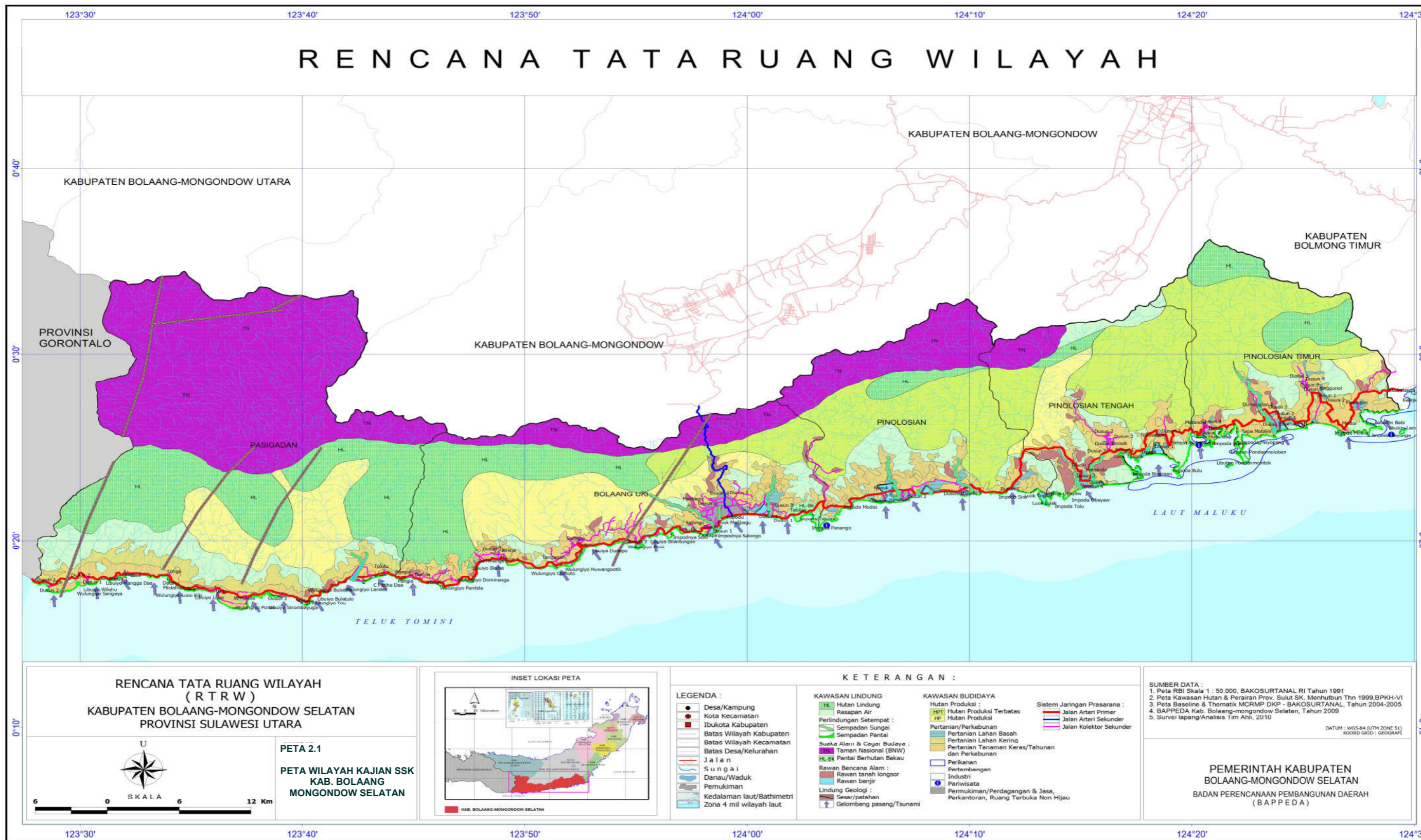
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara geografis terletak antara 00°22' 545" LU dan 123°28' 59,2"BT . Secara administratif wilayah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;
- Sebelah Barat berbatasan kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo.

Kondisi Topografi Kabupaten Bolaang Mongondow berupa bukit-bukit/pegunungan dengan ketinggian dari 0 sampai dengan 1.534 meter dari permukaan laut, panjang pantai 294 Km dan sebagian kecil adalah dataran rendah bergelombang serta memiliki sungai-sungai utama, sedang dan kecil. Sementara luas daratan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah 193.230 Ha, luas wilayah terbangun 2.840 Ha atau sekitar 10,72%.

Luas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow 193.230 Ha meliputi 7 kecamatan yang terdiri dari 81 Desa, berdasarkan luas wilayah dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, menunjukkan bahwa wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Posigadan dengan luas kurang lebih 53.564 Ha atau sekitar 27,72% dari luas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Helumo dengan luas wilayah kurang lebih 13.822 Ha atau sekitar 7,15% dari luas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Wilayah kajian SSK seluruh wilayah administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *(Lihat Peta 2.1. Peta Wilayah Kajian SSK Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Tabel 2.1. Nama dan Luas Wilayah per-Kecamatan serta Jumlah Desa)*

Peta 2.1 Wilayah Kajian SSK Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan



Tabel 2.1.
Nama dan Luas Wilayah per-Kecamatan serta Jumlah Desa

Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah			
		Administrasi		Terbangun	
		(Ha)	(%) Terhadap Total Administrasi	(Ha)	(%) Terhadap Total Administrasi
Bolaang Uki	17	25.521	13,21	626	2,45
Posigadan	16	53.564	27,72	642	1,20
Pinolosian	10	28.593	14,80	399	1,40
Pinolosian Tengah	8	30.207	15,63	431	1,43
Pinolosian Timur	12	22.187	11,48	232	1,05
Helumo	11	13.822	7,15	275	1,99
Tomini Raya	7	19.336	10,01	235	1,22
Total	81	193.230	100	2.840	10,72

Sumber: Data Kependudukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016

Tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2016 sebanyak 73,527 jiwa yang tersebar pada 7 kecamatan. Kecamatan Bolaang Uki merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi, yakni mencapai 18.100 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah di Kecamatan Pinolosian Tengah adalah 6.421 Jiwa. Penyebaran Penduduk juga tidak merata pada setiap kecamatan maupun Desa, sehingga kondisi demografi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki tingkat kepadatan yang berbeda. Jumlah Penduduk Perkotaan tertinggi di Kecamatan Bolaang Uki sebanyak 10.714 Jiwa dan terendah untuk wilayah perkotaan di Kecamatan Pinolosian Timur 1.741 jiwa.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan setiap tahun mengalami peningkatan, baik yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sendiri maupun migrasi dari daerah sekitar Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Pada dasarnya tingkat perkembangan jumlah penduduk, dapat digunakan untuk mengestimasi

perkiraan jumlah penduduk dimasa yang akan datang. Proyeksi jumlah penduduk dimasa yang akan datang dilakukan dengan pendekatan matematik dan menggunakan kecenderungan pertumbuhan penduduk 5 tahun terakhir. Metode proyeksi yang digunakan adalah metode matematik dengan rumus geometri. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 P_t &= P_o (1 + r)^t \\
 P_t/P_o &= (1 + r)^t \\
 \log P_t/P_o &= \log (1+r)^t \\
 \log P_t/P_o &= t \log (1+r) \\
 1/t \log P_t/P_o &= \log (1+r) \\
 \text{antilog } 1/t \log P_t/P_o &= (1+r) \\
 \text{antilog } 1/t \log P_t/P_o - 1 &= r
 \end{aligned}$$

Keterangan:

P_o = jumlah penduduk tahun dasar

P_t = jumlah penduduk akhir (tahun proyeksi)

r = laju pertumbuhan penduduk (%)

t = waktu (tahun)

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang merupakan daerah Kelautan dan Pariwisata dengan rata-rata pertumbuhan penduduk lima tahun terakhir dari tahun 2009 menunjukkan angka 1,77% pertahun. Proyeksi penduduk untuk 5 Tahun kedepan tahun 2021 diprediksikan penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mencapai 78.340 jiwa, dimana setiap keluarga rata-rata memiliki anggota keluarga sebanyak 5 sampai 6 orang. Kecamatan Bolaang Uki memiliki jumlah penduduk terbesar di tahun 2021 yaitu 19.760 jiwa sedangkan Kecamatan Tomini Raya dengan jumlah penduduk terendah yaitu 6.851 jiwa. (Lihat Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Saat Ini dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun dan Tabel 2.3. Jumlah Kepala Keluarga Saat Ini dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun)

Strategi Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Tabel 2.2.
Jumlah Penduduk Saat Ini dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)																	
		Wilayah Perkotaan						Wilayah Pedesaan						Total					
		Tahun						Tahun						Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Bolaang Uki	0	10.904	11.097	11.293	11.493	11.696	18.100	7.516	7.649	7.785	7.923	8.064	18.100	18.420	18.746	19.078	19.416	19.760
2	Pinolosian	0	3.166	3.204	3.242	3.281	3.320	11.645	8.625	8.734	8.845	8.957	9.071	11.645	11.791	11.938	12.087	12.238	12.391
3	Pinolosian Tengah	0	1.998	2.022	2.046	2.070	2.095	6.421	4.500	4.554	4.609	4.665	4.721	6.421	6.498	6.576	6.655	6.735	6.816
4	Pinolosian Timur	0	1.757	1.772	1.788	1.805	1.821	8.364	6.682	6.743	6.804	6.864	6.926	8.364	8.439	8.515	8.592	8.669	8.747
5	Posigadan	0	5.583	5.633	5.684	5.735	5.787	15.308	9.863	9.952	10.041	10.132	10.222	15.308	15.446	15.585	15.725	15.867	16.009
6	Helumo	0	0	0	0	0	0	7.138	7.259	7.383	7.508	7.636	7.766	7.138	7.259	7.383	7.508	7.636	7.766
7	Tomini Raya	0	0	0	0	0	0	6.551	6.610	6.669	6.729	6.790	6.851	6.551	6.610	6.669	6.729	6.790	6.851
Total		23.090	23.406	23.727	24.053	24.384	24.719	50.437	51.057	51.685	52.321	52.967	53.621	73.527	74.463	75.413	76.375	77.351	78.340

Sumber : Hasil Analisa Pokja Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2016

Strategi Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Tabel 2.3
Jumlah Kepala Keluarga Saat ini dan Proyeksinya untuk 5 Tahun

No	Nama Kecamatan	Jumlah KK																	
		Wilayah Perkotaan						Wilayah Pedesaan						Total					
		Tahun						Tahun						Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Bolaang Uki	0	1.817	1.849	1.882	1.915	1.949	3.017	1.253	1.275	1.297	1.321	1.344	3.017	3.070	3.124	3.180	3.236	3.293
2	Pinolosian	0	528	534	540	547	553	1.941	1.438	1.456	1.474	1.493	1.512	1.941	1.965	1.990	2.015	2.040	2.065
3	Pinolosian Tengah	0	333	337	341	345	349	1.070	750	759	768	777	787	1.070	1.083	1.096	1.109	1.123	1.136
4	Pinolosian Timur	0	293	295	298	301	303	1.394	1.114	1.124	1.134	1.144	1.154	1.394	1.407	1.419	1.432	1.445	1.458
5	Posigadan	0	930	939	947	956	964	2.551	1.644	1.659	1.674	1.689	1.704	2.551	2.574	2.598	2.621	2.645	2.668
6	Helumo	0	0	0	0	0	0	1.190	1.210	1.231	1.251	1.273	1.294	1.190	1.210	1.231	1.251	1.273	1.294
7	Tomini Raya	0	0	0	0	0	0	1.092	1.102	1.112	1.122	1.132	1.142	1.092	1.102	1.112	1.122	1.132	1.142
Total		3.848	3.901	3.955	4.009	4.064	4.120	8.406	8.509	8.614	8.720	8.828	8.937	12.255	12.411	12.569	12.729	12.892	13.057

Sumber : Hasil Analisa Pokja Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2016

Pokja Sanitasi Tahun 2016

Ditinjau dari tingkat pertumbuhan penduduk dan kepadatan, untuk wilayah penduduk terpadat berada di Kecamatan Bolaang Uki, yakni 29 jiwa/ha dan yang paling rendah tingkat kepadatannya adalah Kecamatan Pinolosian Tengah, yakni hanya 15 jiwa/ha. Kepadatan penduduk didasarkan atas kondisi distribusi penduduk yang berkaitan dengan jumlah penduduk yang menghuni suatu wilayah berdasarkan batasan wilayah terbangun. Jumlah penduduk yang terdistribusi pada suatu wilayah akan mempengaruhi tingkat konsentrasi pelayanan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. *(Lihat Tabel 2.4. Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Saat Ini dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun)*

Tabel 2.4.
Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Saat Ini dan Proyeksinya
Untuk 5 Tahun

No	Nama Kecamatan	Tingkat Pertumbuhan (%)						Kepadatan Penduduk (Orang/Ha)					
		Tahun						Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Bolaang Uki	-	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	29	29	29	30	30	31
2	Pinolosian	-	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	29	29	29	30	30	30
3	Pinolosian Tengah	-	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	15	15	16	16	17	17
4	Pinolosian Timur	-	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	36	36	36	36	36	36
5	Posigadan	-	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	24	24	24	24	25	25
6	Helumo	-	1,70	1,20	1,20	1,20	1,70	26	26	26	26	26	27
7	Tomini Raya	-	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	28	28	29	29	30	30

Sumber: Analisa Pokja Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara terus menerus dilakukan sebagai bentuk penegakan komitmen pemerintah daerah, pelaku usaha dan segenap unsur masyarakat yang peduli dalam upaya penanggulangan kemiskinan itu sendiri. Hal tersebut sesungguhnya merupakan implementasi amanat konstitusi bagi pencapaian tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Batang Tubuh UUD 1945, Pasal 27 yakni setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan data dari TNP2K, angka kemiskinan pada

tahun 2015 dan analisa Pokja Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar 16.920 KK di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. (Lihat Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Miskin Per-Kecamatan)

**Tabel 2.5.
Jumlah Penduduk Miskin Per-Kecamatan**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin (KK)
1	Bolaang Uki	4.010
2	Pinolosian	2.354
3	Pinolosian Tengah	1.235
4	Pinolosian Timur	2.737
5	Posigadan	3.155
6	Helumo	1.668
7	Tomini Raya	1.761
Total		16.920

Sumber : TNP2K Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2015 dan Analisa Pokja Sanitasi 2016

Dalam konteks tata ruang, secara umum penataan ruang di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bertujuan untuk :

1. Pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten ;
2. Mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten ;
3. Penentuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta ;
4. Penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten ;
5. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi;

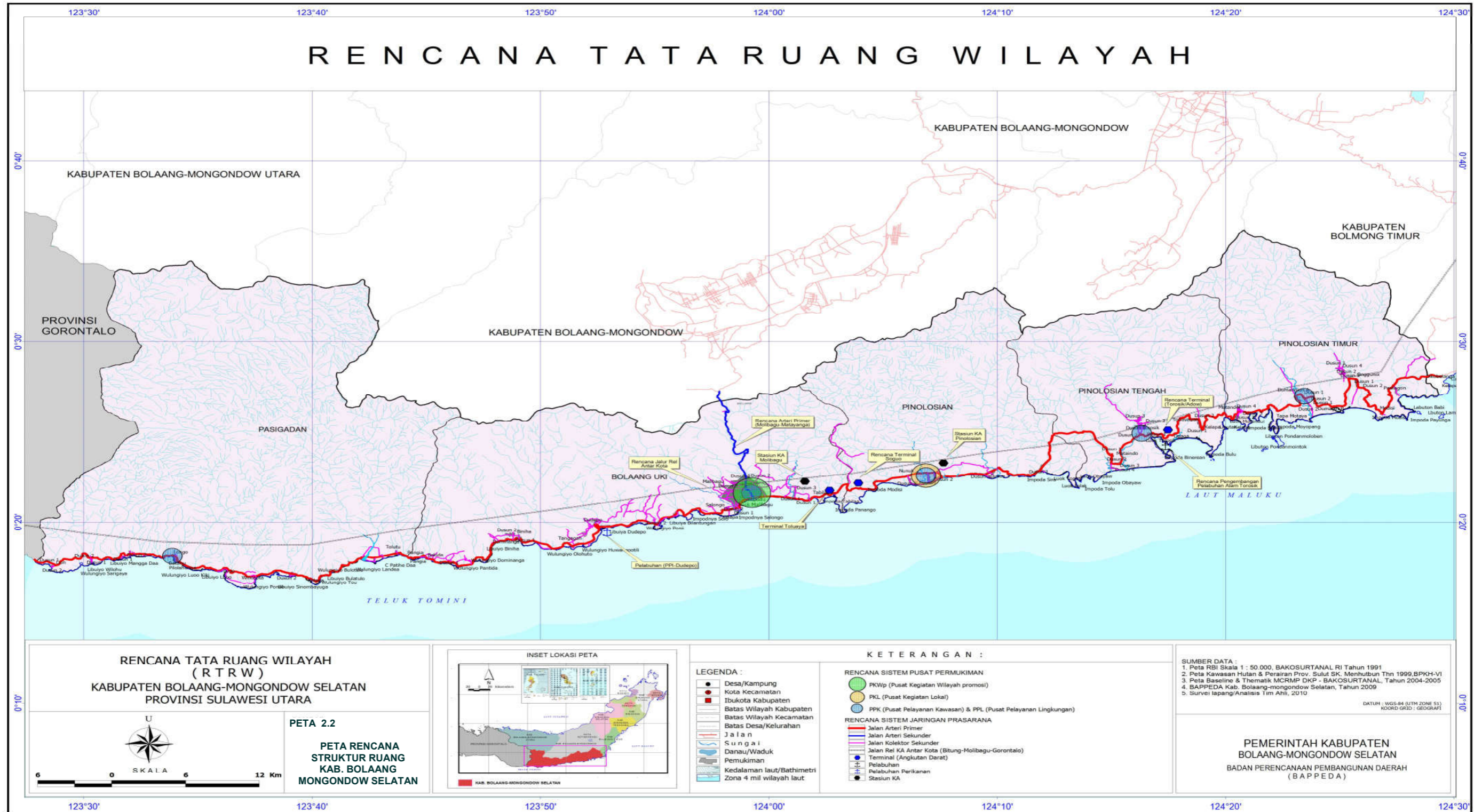
Adapun sasaran yang akan dicapai adalah :

- a) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia; terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- c) terwujudnya keberlanjutan penataan ruang melalui penjaminan kelestarian dan kelangsungan daya dukung/daya tampung lingkungan
- d) terwujudnya keterbukaan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang;

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Rencana struktur tata ruang wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan rencana pembentukan dari berbagai elemen kegiatan serta jaringan transportasi, jaringan sarana dan prasarana yang mendukung pusat-pusat pelayanan, sehingga membentuk suatu sistem terpadu yang mampu memanfaatkan potensi wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan utamanya dalam era keterbukaan. Penjenjangan sistem pusat-pusat pelayanan diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi pemerataan pembangunan pada setiap kawasan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sehingga peran dari pusat-pusat pelayanan menjadi pusat distribusi dan pelayanan yang akan terbentuk secara terhirarki. (*Lihat Peta 2.2. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*)

Peta 2.2 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan



Rencana Hirarki Sistem Pusat Pelayanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Secara umum sistem pusat dan skala pelayanan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdiri atas pusat pelayanan regional yang meliputi; pusat perdagangan, pusat pelayanan transportasi laut, pusat pelayanan transportasi darat, pusat pelayanan kesehatan dan pusat pelayanan olahraga. Sedangkan untuk pusat pelayanan Kabupaten meliputi; pusat pemerintahan Kabupaten dan pusat pelayanan kesehatan di Kecamatan Bolaang Uki. Untuk sub pusat pelayanan Kabupaten hanya di Kecamatan Bolaang Uki sebagai tempat perekonomian dan pemerintahan dan merupakan jalan arteri menuju Provinsi Gorontalo. Penataan layanan perlu pengkajian yang lebih baik lagi agar pelayanan Kabupaten perlu ditingkatkan agar dapat dirasakan oleh masyarakat..

Untuk skala pelayanan lingkungan difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan, hubungan sosial dan pengembangan budaya, serta pelayanan administrasi dan perbelanjaan barang kebutuhan harian maupun jasa. Pusat lingkungan dialokasikan menyebar pada setiap Desa dan lingkungan perumahan dan permukiman.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

PKL ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau
- b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan, antara lain, meliputi pelabuhan lokal, stasiun skala kecil, dan terminal tipe C.

PKL ditetapkan dengan Peraturan Daerah RTRW Provinsi berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota. PKL yang ditetapkan RTRW Provinsi Sulawesi Utara yang berada dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ialah Molibagu (akan menjadi PKWp) dan Pinolosian.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Sedangkan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kecamatan Posigadan ialah Momalia, di Kecamatan Bolaang Uki ialah Molibagu, di Kecamatan Pinolosian ialah Pinolosian, di Kecamatan Pinolosian Tengah ialah Adow, dan di Kecamatan Pinolosian Timur ialah Dumagin B.

Sedangkan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) juga sama dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yaitu Sinombayuga di Kecamatan Posigadan, Salongo di Kecamatan Bolaang Uki, Kombot di Kecamatan Pinolosian, Torosik di Kecamatan Pinolosian Tengah, dan Onggunoi di Kecamatan Pinolosian Timur.

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dititikberatkan pada pengembangan infrastruktur transportasi darat dan transportasi laut agar dapat menunjang sistem pusat pengembangan wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan menghasilkan pola jaringan transportasi yang terpadu, baik transportasi darat maupun transportasi laut. Pengembangan sistem prasarana transportasi ini diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dan mobilitas penduduk terutama pelaku pembangunan dan ekonomi terhadap pusat-pusat kegiatan produksi dan pemasaran, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Bolaang Mongondow Selatan. Pengembangan sistem prasarana transportasi dilakukan untuk menunjang mekanisme sistem Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Dengan demikian tujuan rencana pengembangan infrastruktur transportasi darat dan transportasi laut di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah:

- 1) Mengembangkan sistem jaringan arteri primer sebagai penghubung interaksi antara Pusat Kegiatan Wilayah (Kotamobagu) ke Pusat Kegiatan Lokal (Molibagu) dan dari Kota Gorontalo ke Molibagu melalui peningkatan aksesibilitas antara Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan

Lokal (PKL) dengan cara meningkatkan jaringan jalan yang ada, membuka jaringan jalan baru dan meningkatkan sarana transportasi darat.

- 2) Mengembangkan sistem jaringan kolektor primer antara Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ke Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan transportasi darat, serta memberi kemudahan melalui sarana transportasi antara Pusat Kegiatan Nasional (Kota Manado, Ibukota Provinsi) dan Pusat Kegiatan Lokal (Molibagu, Ibu Kota Kabupaten).
- 3) Mengembangkan jalan lokal primer sebagai penghubung antar Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) melalui peningkatan aksesibilitas antara Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan cara meningkatkan jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan yang ada, membuka jaringan jalan lokal baru dan meningkatkan sarana transportasi darat.
- 4) Mengembangkan sistem prasarana angkutan umum perdesaan dan angkutan umum massal berbasis jalan raya dan atau rel yang dikembangkan secara berhirarki untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan atau antar pusat kegiatan dengan kota-kota di wilayah sekitar.
- 5) Mengembangkan terminal/stasiun angkutan darat sebagai simpul transportasi darat, untuk mendukung angkutan antar perdesaan, antar kota serta mengembangkan terminal terpadu/stasiun antar moda dalam kota.
- 6) Mengembangkan terminal/stasiun Kereta Api (KA) sebagai simpul jalur kereta api antar kota dan perkotaan.
- 7) Mengembangkan pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan untuk mendukung PKL Molibagu (akan menjadi PKWp) dan PPK Pinolosian.

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Rencana pola pemanfaatan ruang meliputi batas-batas kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan lainnya (kawasan lindung, kawasan pariwisata, kawasan industri dan kawasan budidaya). Rencana pola pemanfaatan ruang kawasan lindung bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk memanfaatkan potensi keindahan

alam, budaya dan sejarah di kawasan pariwisata guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk kawasan industri, dimana pemanfaatan ruang peruntukan industri harus sebesar-besarnya bagi upaya mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah dan peningkatan pendapatan yang tercipta akibat efisiensi biaya investasi dan proses aglomerasi, dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sedangkan kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia. Kawasan budidaya yang dimaksudkan meliputi kawasan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan perumahan, kawasan perdagangan/jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri dan perdagangan, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan ruang sektor informal, kawasan pertahanan dan keamanan serta kawasan pelayanan umum. *(Lihat Peta 2.3. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)*

2.2. Kemajuan Pelaksanaan SSK

2.2.1 Air Limbah Domestik

Melihat kemajuan pelaksanaan pembangunan sanitasi dengan mengukur dan memperbaharui kondisi dasar sanitasi, memantau dampak, hasil dan keluaran dari kegiatan sektor sanitasi Kabupaten dan memastikan bahwa tujuan dan sasaran sanitasi, rencana pengembangan dan target tertentu sanitasi Kabupaten, serta kepatuhan pada standar pelayanan minimum yang ada sudah dilaksanakan secara efektif. Perkembangan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen strategi sanitasi Kabupaten tahun 2012 penanganan BABs tidak terlalu besar memberikan dampak, berdasarkan hasil studi EHRA praktik BABs masih menunjukkan angka 65% pada tahun 2012. Sedangkan di Tahun 2016 menjadi 60% artinya ada penurunan Babs kurang lebih 5% (Lihat Tabel 2.6. Tabel Kemajuan Pelaksanaan SSK Untuk Air Limbah Domestik)

Tabel 2.6.

Tabel Kemajuan Pelaksanaan SSK Untuk Air Limbah Domestik

SSK Tahun 2012 - Tahun 2016			SSK Tahun 2016
Tujuan	Sasaran	Data Dasar	Status Saat Ini
(1)	(2)	(3)	(4)
Tercapainya Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk layanan Air Limbah Domestik Tahun 2017	Berkurangnya praktek Buang Air Besar Sembarang (BABS) dari 65% menjadi 0% Tahun 2017	Tidak ada penduduk yang melakukan praktek BABS di tahun 2017.	Berdasarkan hasil studi EHRA masyarakat yang masih melakukan praktik BABs sebesar 60% masih belum signifikan

Tersedianya Masterplan Air Limbah	Adanya masterplan Limbah	Buku Air	Masterplan belum ada	Belum adanya master plan dalam penanganan air limbah
Meningkatnya kepemilikan jamban dari 35,8% menjadi 80%	Bertambahnya jumlah KK yang memiliki jamban sehat		Kepemilikan jamban sebesar 35.8%	Pertambahan kepemilikan jamban sehat menjadi 39,8% (4.895 KK)

Sumber : Buku Putih dan Strategi Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2012

2.2.2 Persampahan

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan persampahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, perlu ada keselarasan dan kesesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan yang telah dibuat. Tingkat cakupan layanan persampahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berkurangnya timbunan sampah sebesar 20% di 17 Desa, dan sampah yang terangkut meningkat 20%. Menunjukkan adanya peningkatan sebesar 75% yang terangkut ke TPA di 5 Kecamatan yaitu Bolaang Uki, Posigadan, Pinolosian, Pinolosian Tengah, dan Pinolosian Timur. Dari data ini memberikan dampak yang signifikan, apalagi sudah dimulainya pengoperasian TPA Pinolantungan. Untuk wilayah Ibukota Kecamatan menjadi prioritas penanganan persampahan yang langsung penanganannya dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup, sedangkan daerah atau wilayah yang lain masih dilakukan penanganan secara tidak langsung (*Lihat Tabel 2.7. Tabel Kemajuan Pelaksanaan SSK Untuk Persampahan*).

Tabel 2.7.
Tabel Kemajuan Pelaksanaan SSK Untuk Persampahan

SSK Tahun 2012 - Tahun 2016			SSK Tahun 2015
Tujuan	Sasaran	Data Dasar	Status Saat Ini
(1)	(2)	(3)	(4)
Mengurangi Timbulan sampah disumbernya	Pencapaian pengurangan kuantitas sampah sebesar 20% tahun 2017	Sampah yang terangkut meningkat sebesar 20 % atau dari hanya 6 desa saat ini meningkat menjadi 17 desa yang dapat terlayani	Sampah yang terangkut berkisar 75% yang ada di kecamatan Bolaang Uki dan Pinolosian, yang terlayani hanya 11 Desa,
Tercapai cakupan layanan persampahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Tercapaiannya peningkatan kinerja pengelola persampahan yang mantap dan berkembangnya kerjasama regional	Berkurangnya Timbunan sampah mulai dari sumbernya sebesar 20% di 17 desa seputar Kecamatan Bolaang Uki dan pinolosian, cakupan layanan dari 25 m ³ /hr menjadi 100 m ³ /hr tahun 2017	Cakupan wilayah hanya di kecamatan Bolaang Uki Pinolosian, Pinolosian Tengah, Pinolosian Timur dan Posigadan yang terdiri dari 11 Desa

Sumber : Buku Putih dan Strategi Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2012

2.2.3 Drainase Perkotaan

Pencapaian pembangunan sektor sanitasi disusun dengan melakukan analisis terhadap kondisi wilayah saat ini serta arah pengembangan secara menyeluruh. Penanganan drainase perkotaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan kondisi topografi kurang lebih 80%

merupakan daerah perbukitan dan selebihnya daerah datar yang sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. (Lihat Tabel 2.8. Tabel Kemajuan Pelaksanaan SSK Untuk Drainase)

Tabel 2.8.
Tabel Kemajuan Pelaksanaan SSK Untuk Drainase

SSK Tahun 2012 - Tahun 2016			SSK Tahun 2016
Tujuan	Sasaran	Data Dasar	Status Saat Ini
(1)	(2)	(3)	(4)
Tersedianya Master plan dan Sistem Jaringan Drainase Skala Kota dan Wilayah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2017.	Terlaksananya Peningkatan pembangunan sistem drainase yang efisien dan terpadu minimal 40% tahun 2017	Tidak terjadi genangan air buangan setinggi 30 cm, selama 2 Jam dan tidak lebih dari 2 kali dalam satu tahun di tahun 2017	Luas genangan 24,5% setinggi 30-40 cm selama 2 jam tidak lebih dari 2 kali dalam setahun Dimana sebagian besar dipengaruhi oleh pasang surut
Meningkatkan sarana dan prasarana fisik perkotaan	Berkurangnya luas genangan di kawasan permukiman 70 % dari 200 Ha menjadi 50 Ha	Luas genangan di kabupaten Bolaang Mongondow selatan sebesar 200 Ha	Luas genangan 27% atau sebesar 996 Ha dipengaruhi oleh pasang surut

Sumber : Buku Putih dan Strategi Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2012

2.3 Profil Sanitasi Saat Ini

Dalam penilaian Profil Sanitasi merupakan gambaran lengkap dan menyeluruh baik teknis maupun nonteknis dan mencakup berbagai aspek tentang sanitasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder. Secara umum kondisi pengelolaan sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih belum memadai.

2.3.1 Air Limbah Domestik

Limbah domestik umumnya limbah rumah tangga merupakan buangan yang berbentuk cair, gas dan padat. Air limbah harus dikelola untuk mengurangi pencemaran. Pengelolaan air limbah dapat dilakukan dengan membuat saluran air kotor dan peresapan dengan memperhatikan beberapa hal, diantaranya tidak mencemari sumber air minum yang ada di daerah sekitarnya, tidak mengotori permukaan tanah sehingga bisa mengakibatkan tersebarnya cacing tambang pada permukaan tanah, mencegah berkembang biaknya lalat dan serangga lainnya, tidak menimbulkan bau yang mengganggu.

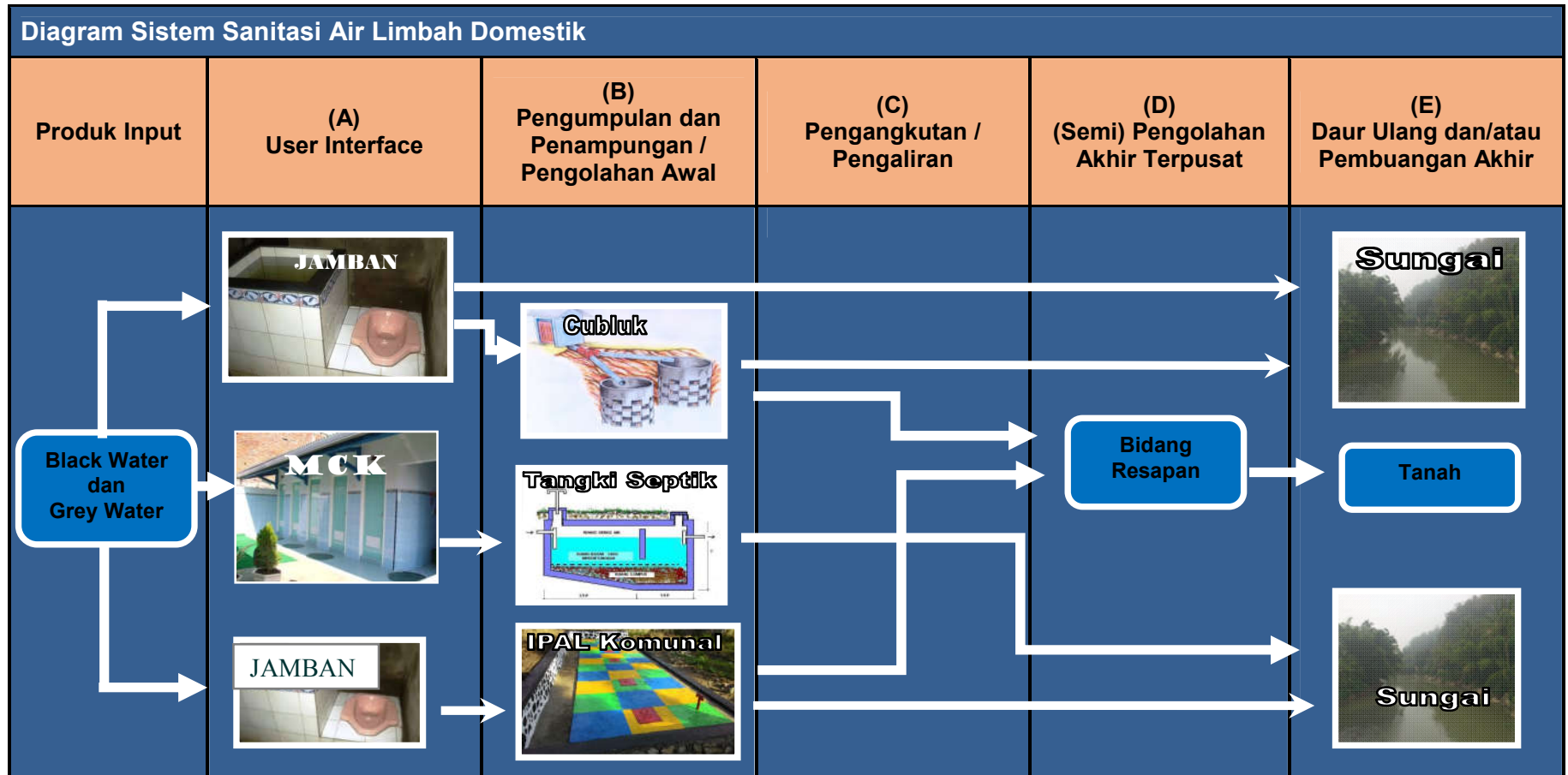
1) Sistem dan Infrastruktur

Sistem pengolahan air limbah domestik masih dikelola secara *on-site system (setempat)*. Berdasarkan hasil studi EHRA tahun 2016, sistem ini meliputi tangki septik sebesar 39,8%, system Terpusat (off site) Ipal Komunal pipa sewer 0,2% dan selebihnya Babs 60%.

Sistem pengolahan air limbah domestik yang terdiri atas black water yang berasal dari tinja, urine, air pembersih dan air penggelontor. Umumnya menggunakan jamban leher angsa dengan kontruksi penampungan dan pengumpulan berupa tangki septik, pipa sewer dan cubluk. Pada umumnya sistem pembuangan limbah non tinja ini dialirkan melalui lubang resapan yang disalurkan melalui saluran terbuka yang dialirkan ke sistem drainase atau ke sungai (*Lihat Peta 2.4. Peta Cakupan Layanan Air Limbah Domestik, Gambar 2.1. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Tabel 2.9. Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat Ini Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*)

Sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan belum berjalan efektif sebagaimana diharapkan dan itupun hanya diprakarsai oleh pemerintah, belum dilakukan oleh dunia usaha ataupun masyarakat. Dari pihak pemerintah daerah belum menyediakan mobil pengangkut tinja. Faktor utama adalah masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan air limbah dimana hal tersebut didasari oleh ketidaktahuan masyarakat kapan perlu dilakukan penyedotan lumpur tinja. (*Lihat Tabel 2.10. Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik*)

Gambar 2.1 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik



Strategi Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Tabel 2.9. Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat Ini di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (KK)	AKSES LAYAK (KK)							Akses Dasar (KK)		BABs (KK)
			On-Site			Off-Site				Tangki Septik Individual Belum Aman	Cubluk	
			Tangki Septik Individual	Tangki Septik Komunal (<=10 KK)	MCK	Tangki Septik Komunal (>10 KK)	IPAL Komunal	IPAL Kawasan	IPAL Kota			
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)	(xiii)
1	Bolaang Uki	3.017	672	0	589	0	11	0	0	804		940
2	Posigadan	2.551	466	0	514	0	0	0	0	555		1.016
3	Pinolosian	1.941	464	0	331	0	0	0	0	362		784
4	Pinolosian Tengah	1.070	246	0	119	0	2	0	0	139		564
5	Pinolosian Timur	1.394	218	0	198	5	0	0	0	477		496
6	Helumo	1.190	307	0	122	0	0	0	0	271		489
7	Tomini Raya	1.092	471	0	159	0	0	0	0	114		348

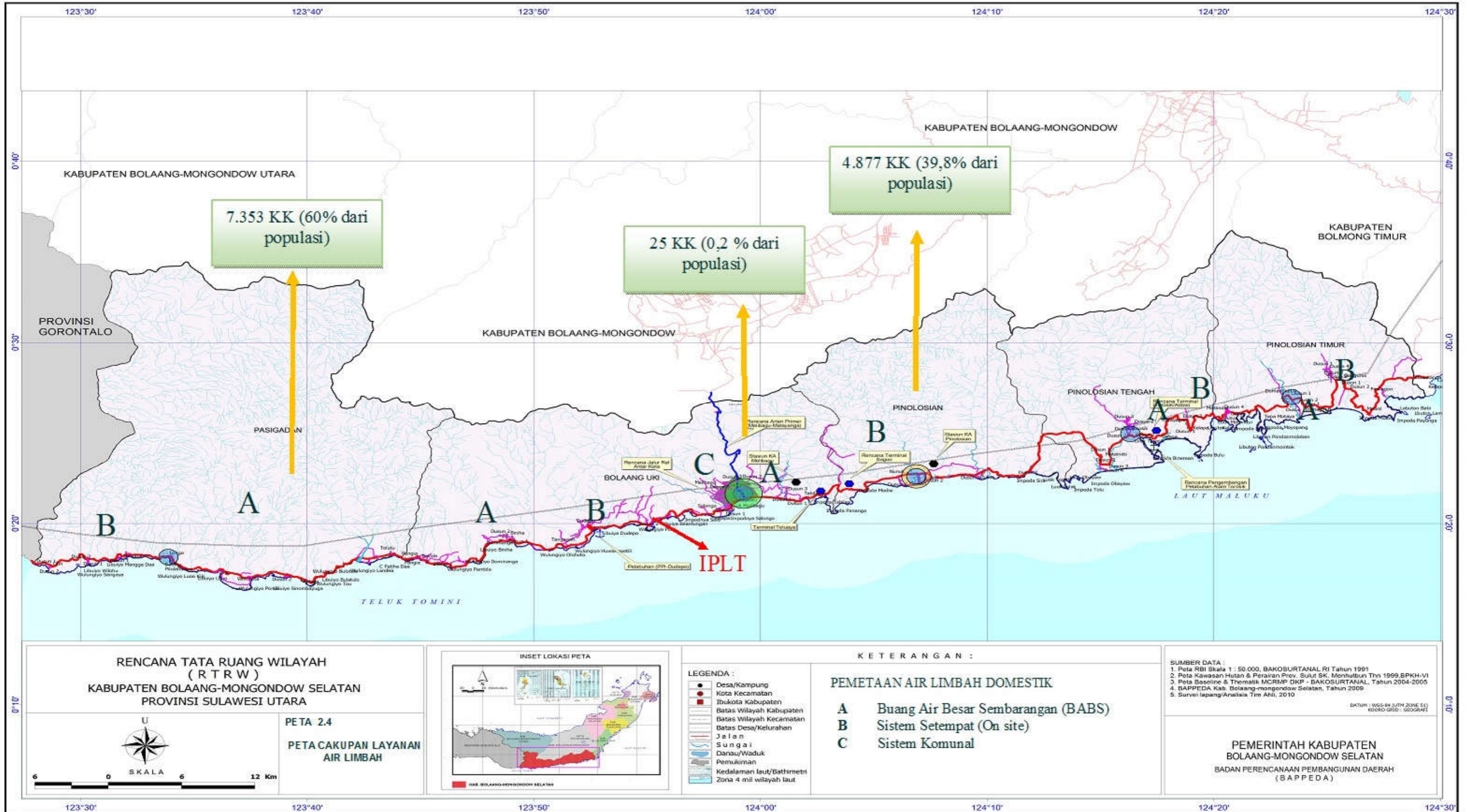
Sumber : Dinas Kesehatan, Dinas PU Cipta Karya Tahun 2015 dan analisa Pokja Sanitasi Tahun 2016

Tabel 2.10 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik

No	Jenis	Satuan	Jumlah/ Kapasitas	Kondisi		Keterangan
				Berfungsi	Tidak Berfungsi	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
SPAL Setempat (Sistem Onsite)						
1	Berbasis komunal					
	- MCK Komunal	unit	4.628	4.628	0	-
2	Truk Tinja	unit	0	0	0	-
3	IPLT: kapasitas	M ³ /hari	0	0	0	-
SPAL Terpusat (Sistem Offsite)						
1	Berbasis Komunal					
	- Tangki Septik Komunal >10KK	Unit	22	22	0	-
	- IPAL Komunal	Unit	23	23	0	-
2	IPAL Kawasan/Terpusat					
	- Kapasitas	M ³ /hari	0	0	0	-
	- Sistem	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas PU Cipta Karya Tahun 2015 dan Analisa Pokja Sanitasi Tahun 2016

Peta 2.4. Peta Cakupan Layanan Air Limbah Domestik



2) Kelembagaan dan Peraturan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, baik daerah provinsi maupun kabupaten/Kabupaten

Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pengelolaan air limbah domestik menjadi tupoksi lintas SKPD yang mana secara teknis menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan. Pengelolaan air limbah domestik juga berkaitan erat dengan tupoksi SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terutama dalam hal perumusan kebijakan, pengawasan maupun pembinaan.

Institusi pemerintahan tersebut memiliki korelasi yang kuat, dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan berperan sebagai operator karena lebih bersifat teknis dan Badan Lingkungan Hidup Daerah serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah lebih memainkan peran sebagai regulator. Upaya-upaya preventif dan promotif menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik sehingga peran dari Dinas Kesehatan juga sangat penting.

Ditingkat masyarakat dan swasta belum ada upaya yang terfokus terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi standar pelayanan penyehatan lingkungan. Dengan kedudukan kelembagaan yang masih lemah baik ditingkat masyarakat, swasta dan pemerintah maka upaya pencapaian target pengelolaan air limbah belum ada langkah-langkah nyata, sehingga berpengaruh pada belum tersedianya perangkat peraturan terkait pengelolaan air limbah di tingkat daerah.

2.3.2 Persampahan

Infrastruktur persampahan yang tersedia dan digunakan oleh masyarakat mayoritas berupa TPS, berdasarkan hasil studi EHRA sampah yang dikumpulkan di TPS sebesar 8,95% dan sampah yang langsung dibakar 68,96%. Selebihnya, masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, yang tidak terolah sebesar 22,09% .

Ketidakterediaan ataupun minimnya sarana dan prasarana persampahan menjadi salah satu penyebab penanganan sampah masih terabaikan, disamping kemampuan, wawasan dan kesadaran masyarakat yang juga masih rendah terutama penerapan konsep 3R belum terinternalisasi dalam pengelolaan sampah. Disisi lain, pihak swasta maupun lembaga non pemerintah sampai saat ini belum memperlihatkan partisipasi, inisiatif dan kontribusi nyata terhadap pengelolaan persampahan.

1) sistem dan Infrastruktur

Kriteria dan dasar pelayanan persampahan berdasarkan target Pembangunan Nasional adalah 70% sampah domestik dan 100% sampah non domestik harus mendapatkan penanganan melalui sistem pelayanan umum. Dalam memaksimalkan pelayanan pengelolaan persampahan perdesaan dibutuhkan arahan yang tepat, bukan hanya pada kebutuhan akan pendanaan tetapi juga adalah bagaimana pengelolaan kegiatan pelayanan yang terdiri atas beberapa kegiatan utama, antara lain adalah pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemerosesan akhir sampah. Disamping itu, tak bisa dipungkiri bahwa peranan masyarakat sangat besar dalam pelayanan pengelolaan persampahan dimana perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan lingkungan yang sehat bebas dari sampah karena sebaik apapun sarana maupun sistem pengelolaan persampahan apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran akan tetap menjadi masalah yang tak bisa diselesaikan.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah melayani persampahan secara menyeluruh, terutama untuk daerah perkotaan atau ibukota kecamatan. Sampai saat ini, tingkat cakupan layanan persampahan meliputi layanan pengangkutan (RT-TPS-TPA) sebesar 8,95%, masih jauh dari harapan sehingga perlu penanganan persampahan yang baik (*Lihat Peta 2.5. Peta Cakupan Layanan Persampahan*)

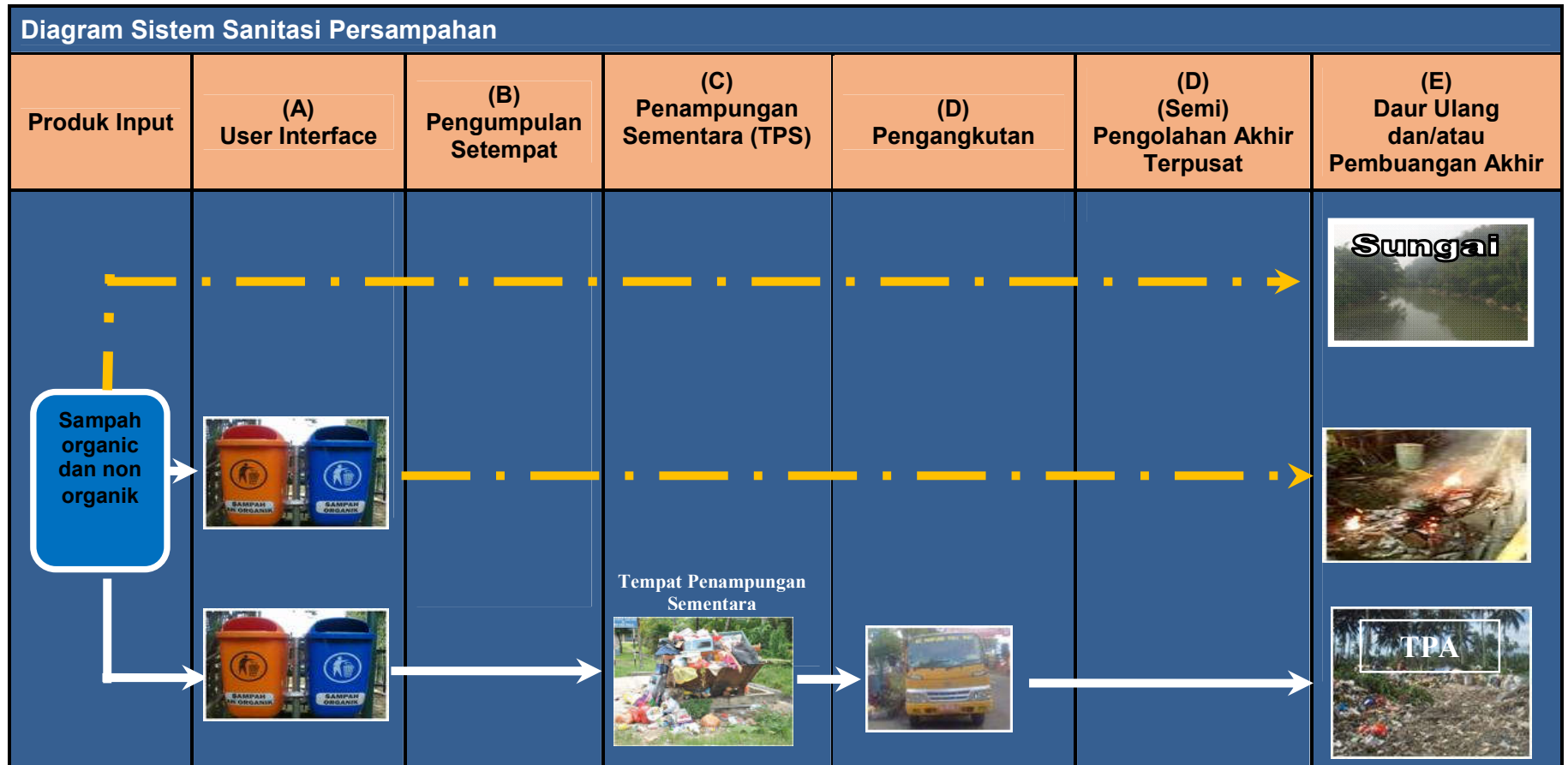
Penanganan sampah dengan cara membakar secara terbuka (*open burning*) masih menjadi pilihan yang dilakukan masyarakat. Padahal dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Juknis SPM Bidang Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa selain kegiatan transportasi dan industri, kegiatan pembakaran terbuka dan kawasan permukiman juga memiliki pengaruh terhadap kualitas udara.

Sebagian masyarakat menganggap pembakaran sampah bukanlah sesuatu yang dapat menguatirkan, terlebih karena Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan luasan lahan yang masih sangat memadai, penggunaan bahan dan materi yang dominan masih alami, dianggap tidak memberikan intervensi terhadap kualitas udara. Padahal jika dihitung volume timbunan sampah yang dihasilkan sampah tersebut dibakar setiap harinya, maka dapat dibayangkan seberapa besar pengaruhnya terhadap kualitas udara yang setiap saat dihirup. (*Lihat Gambar 2.2. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan*)

Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sumber timbunan sampah terbesar adalah kawasan permukiman dan perdagangan baik sampah yang organik maupun anorganik. (*Lihat Tabel 2.11. Timbunan Sampah per Kecamatan dan Tabel 2.12. Cakupan Akses dan Sistem Layanan Persampahan Kecamatan*)

Pelayanan persampahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan saat ini didukung oleh keberadaan sarana dan prasarana yang kondisinya jumlahnya masih terbatas. Jumlah sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan saat ini terdiri atas 3 unit gerobak sampah (beroperasi), 9 unit motor sampah (beroperasi), 1 unit dump truck (beroperasi), dan 2 unit arm roll truck (tidak beroperasi). Jumlah TPS yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berjumlah 122 sedangkan TPS 3R hanya ada di Kecamatan Bolaang Uki 1 Lokasi (*Lihat Tabel 2.13. Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan*)

Gambar 2.2 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan



Tabel 2.11.
Timbulan Sampah per Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Timbulan Sampah									
		Sampah Dikelola Mandiri di Sumber		Sampah Terproses 3R		Sampah Terangkut ke TPA		Sampah Tidak Terproses		Total	
		(%)	(m ³ /hari)	(%)	(m ³ /hari)	(%)	(m ³ /hari)	(%)	(m ³ /hari)	(%)	(m ³ /hari)
Bolaang Uki	18.100	52,10		0	0	47,9		0	0	100	0
Posigadan	15.308	70,31		0	0	0	0	29,69	0	100	0
Pinolosian	11.645	85,23		0	0	14,8			0	100	0
Pinolosian Tengah	6.421	59,37		0	0	0	0	40,63	0	100	0
Pinolosian Timur	8.364	69,37		0	0	0	0	30,63	0	100	0
Helumo	7.138	81,35		0	0	0	0	18,68	0	100	0
Tomini Raya	6.551	65,00		0	0	0	0	35	0	100	0

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Tahun 2015 dan Analisa Pokja Sanitasi Tahun 2016

Tabel 2.12.
Cakupan Akses dan Sistem Layanan Persampahan Kecamatan

No	Nama Kecamatan	3R						Volume Sampah yang Terangkut Ke TPA		Total	
		Wilayah Perdesaan		Wilayah Perkotaan		Total		Wilayah Perkotaan			
		(%)	(m ³)	(%)	(m ³)	(%)	(m ³)	(%)	(m ³)	(%)	(m ³)
1	Bolaang Uki	0	0	0	0	8,6	6	48	0	48	0
2	Posigadan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pinolosian	0	0	0	0	0	0	15	0	15	0
4	Pinolosian Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pinolosian Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Helumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Tomini Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

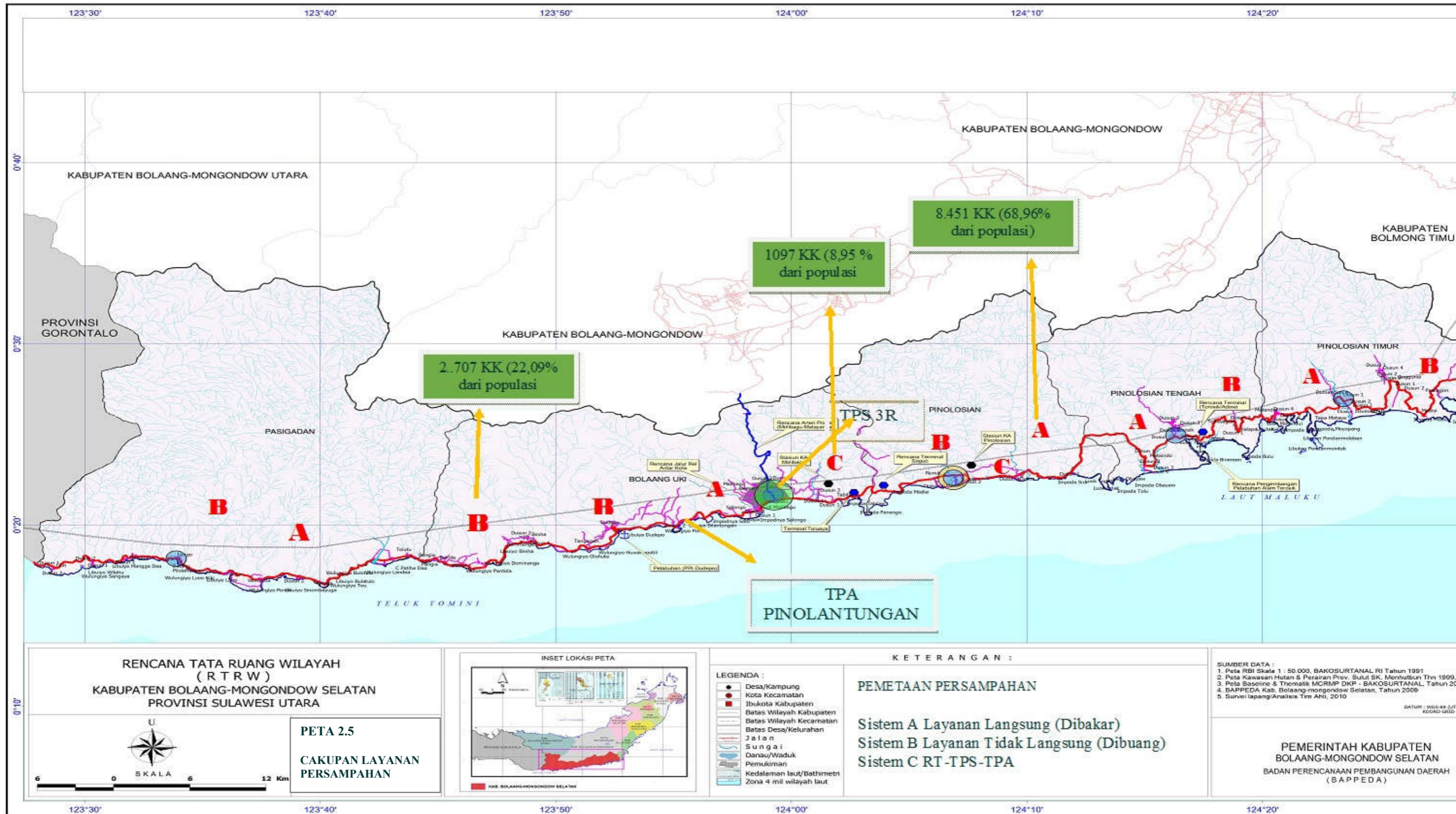
Sumber : Badan Lingkungan Hidup Tahun 2015 dan Analisa Pokja Sanitasi Tahun 2016

Tabel 2.13.
Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan

No	Jenis Prasarana / Sarana	Satuan	Jumlah	Kapasitas	Ritasi /hari	Kondisi			Ket.
				m ³		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)
1	Pengumpulan Setempat								
	- Gerobak	Unit	6	1		3	0	3	Tdk jalan
	- Motor Sampah	Unit	8	1	3	8	0	0	-
	- Kendaraan Pick Up	Unit	0	0	0	0	0	0	-
2	Tempat Penampungan Sementara (TPS)								
	- Bak Sampah (beton/kayu/fiber)	Unit	120	1	3	120	0	0	-
	- Container	Unit	2	6	0	0	0	0	Tdk jalan
	- Transfer Stasiun	Unit	0	0	0	0	0	0	-
	- SPA (Stasiun Peralihan Antara)	Unit	0	0	0	0	0	0	
3	Pengangkutan								
	- Dump Truck	Unit	1	6	3	1	0	0	-
	- Arm Roll Truck	Unit	2	6	0	0	0	0	Tdk jalan
	- Compactor Truck	Unit	0	0	0	0	0	0	-
4	Pengolahan Sampah								
	- Sistem 3R	Unit	0	0	0	1	0	0	Tdk jalan
	- Incinerator	Unit	0	0	0	0	0	0	-
5	TPA/TPA Regional								
	- Luas Total TPA yang terpakai	Ha	3,5	0	0	1	0	0	-
	- Luas sel landfill	Ha	0,5	0	0	1	0	0	-
	- Daya Tampung TPA	m ³ /hari	18,35	1.000	3	1	0	0	-
6	Alat Berat								
	- Bulldozer	Unit	1	0	0	1	0	0	-
	- Wheel/truck loader	Unit	0	0	0	0	0	0	-
	- Excavator /backhoe	Unit	1	0	0	0	1	0	-
	- Truk Tanah	Unit	0	0	0	0	0	0	-
7	IPL:Sistem Kolam/Aerasi								
	Hasil pemeriksaan lab (BOD dan COD):								
	- Efluen di Inlet	-	0	0	0	0	0	0	-
	- Efluen di Outlet								

Sumber : BLH Tahun 2016

Peta 2.5. Peta Cakupan Layanan Persampahan



2) Kelembagaan dan Peraturan

Berdasarkan orientasi kerja dan kesepadanan tupoksi SKPD maka pengelolaan sub sektor persampahan secara operasional berkaitan langsung dengan Badan Lingkungan Hidup sedangkan Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Bappeda lebih berperan dalam perumusan kebijakan serta perencanaan secara makro. Pengelolaan sub sektor persampahan tidak cukup hanya berorientasi pada upaya-upaya penyediaan sarana dan prasarana serta penyelamatan lingkungan tetapi juga sangat diintervensi oleh aspek penyehatan lingkungan dan perilaku hidup masyarakat sehingga Dinas Kesehatan juga memegang peranan penting terutama dalam tahap preventif dan promotif.

Badan Lingkungan Hidup yang memiliki mandat tupoksi langsung untuk pengelolaan sub sektor persampahan. tupoksi yang dimaksud antara lain merencanakan langkah-langkah teknik, menyusun konsep yang sifatnya teknis, melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi secara teknis kegiatan bidang kebersihan.

Merumuskan kebijaksanaan, program dan kegiatan pembangunan daerah bidang Perencanaan Wilayah meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman, merupakan tupoksi Bidang Perencanaan Wilayah pada Bappeda sehingga juga memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan sub sektor persampahan. Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan adalah bidang berkaitan erat dengan pengelolaan sub sektor persampahan.

Pengawasan Lingkungan, monitoring dan evaluasi adalah bidang pada Badan Lingkungan Hidup Daerah yang memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan sub sektor persampahan. Hal tersebut tergambar dari tupoksi yang diemban antara lain merumuskan kebijakan operasional, melaksanakan pembinaan, evaluasi implementasi program pencegahan dan pengendalian serta pemulihan kualitas lingkungan. Tupoksi tersebut kemudian menempatkan Badan Lingkungan Hidup Daerah pada posisi regulator dalam pengelolaan sub sektor persampahan.

Diluar SKPD tersebut umumnya penanganan masih bersifat internal. Perangkat peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan persampahan baru pada pengaturan redistribusi dan jalur pendistribusian sampah, sehingga kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan persampahan belum bisa menjawab permasalahan persampahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

2.3.3 Drainase Perkotaan

Sistem drainase perkotaan terdiri dari berbagai elemen yang seringkali dioperasikan dan dikelola oleh berbagai institusi, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/Kabupaten. Masing-masing institusi seringkali menggunakan berbagai defenisi dan terminologi yang berbeda untuk berbagai elemen dari sistem sungai dan drainase. Dalam bidang Pekerjaan Umum sendiri, seringkali terminologi ini hanya menyebutkan drainase utama dan minor. Sementara dari Pengelola Sumber Daya Air, hampir semua drainase perkotaan diperlakukan sebagai drainase mikro. Terlepas dari berbagai defenisi tersebut, pada dasarnya drainase merupakan prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan penerima air dan atau ke bangunan resapan buatan, baik yang sifatnya primer, sekunder maupun tersier.

Secara umum, sistem drainase perkotaan dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu lingkungan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Berdasarkan fungsi pelayanan, sistem drainase perkotaan dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Sistem drainase lokal, yang termasuk dalam sistem drainase lokal adalah sistem saluran awal yang melayani suatu kawasan permukiman tertentu seperti kompleks permukiman, areal pasar, perkantoran, areal industry dan komersial. Sistem ini melayani area kurang dari 10 ha. Pengelolaan sistem drainase lokal menjadi tanggung jawab masyarakat, pengembang atau instansi lainya.
- b. Sistem drainase utama, yang termasuk dalam sistem drainase utama adalah saluran drainase primer, sekunder, dan tersier beserta bangunan kelengkapannya yang melayani kepentingan sebagian

besar warga masyarakat. Pengelolaan sistem drainase utama merupakan tanggung jawab pemerintah.

- c. Pengendalian banjir (*Flood Control*) adalah sungai yang melintasi wilayah Kabupaten yang berfungsi mengendalikan air sungai, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kegiatan kehidupan manusia. Pengelolaan pengendalian banjir merupakan tanggung jawab pemerintah.

Berdasarkan fisiknya, sistem drainase terdiri atas saluran primer, sekunder, dan tersier.

- a. Sistem saluran primer adalah saluran utama yang menerima masukan aliran dari saluran sekunder. Dimensi saluran ini relatif besar. Akhir saluran primer adalah badan penerima air.
- b. Sistem saluran sekunder adalah saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran air dari saluran tersier dan limpasan air dari permukaan sekitarnya, dan meneruskan air ke saluran primer. Dimensi saluran tergantung pada debit yang dialirkan.
- c. Sistem saluran tersier adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran drainase lokal.

Secara umum kondisi jaringan drainase belum cukup tersedia dengan layak, baik pada ruas jalan utama maupun di unit lingkungan permukiman. (*Lihat Peta 2.6. Peta Lokasi Genangan*)

Secara struktur drainase di Kabupaten Kawasan Bolaang Mongondow Selatan dan sekitarnya pada umumnya adalah pasangan batu, namun pemeliharaan yang kurang baik sehingga pendangkalan terjadi dan banyaknya sampah yang menumpuk di saluran mengakibatkan kurang lancarnya sistem pengaliran di dalam saluran tersebut sehingga menimbulkan genangan di beberapa titik. (*Lihat Tabel 2.14. Lokasi Genangan dan Luas Genangan dan Tabel 2.15. Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*)

Tabel 2.14.
Lokasi Genangan dan Luas Genangan

No	Lokasi Genangan	Wilayah Genangan				Penyebab	Infrastruktur	
		Luas	Ketinggian	Lama	Frekuensi		Jenis	Ket.
		(Ha)	(m)	(jam/hari)	(kali/tahun)			
1	Desa Tolondadu	9	0,2 - 0,4	2 – 5	2 kali	Aliran permukaan ketemu dengan air pasang	Saluran Pasangan Batu	-
2	Desa Dumagin B	16	0,1 – 0,3	2 – 6	2 kali	Aliran permukaan ketemu dengan air pasang	Saluran Pasangan Batu	-
3	Desa Matandoi	26	0,1 – 0,3	1 – 2	2 kali	Aliran permukaan ketemu dengan air pasang	Saluran Pasangan Batu	-
4	Desa Tabilaa	18	0,1 – 0,4	2 – 8	2 kali	Aliran permukaan ketemu dengan air pasang	Saluran Pasangan Batu	-
5	Desa Toluaya	12	0,2 – 0,3	1 - 2	2 kali	Aliran permukaan ketemu dengan air pasang	Saluran Pasangan Batu	-
6	Desa Onggunoi	14	0,1 – 0,3	1 – 2	2 kali	Aliran permukaan ketemu dengan air pasang	Saluran Pasangan Batu	
7	Desa Posilagon	16	0,1 – 0,3	1 – 2	2 kali	Aliran permukaan ketemu dengan air pasang	Saluran Pasangan Batu	
8	Desa Biniha	20	0,1 – 0,3	1 – 2	2 kali	Aliran permukaan ketemu dengan air pasang	Saluran Pasangan Batu	
9	Desa Onggunoi	14	0,1 – 0,3	1 – 2	2 kali	Aliran permukaan ketemu dengan air pasang	Saluran Pasangan Batu	
10	Luwoo	20	0,1 – 0,4	2 – 8	2 kali	Aliran permukaan ketemu dengan air pasang	Saluran Pasangan Batu	

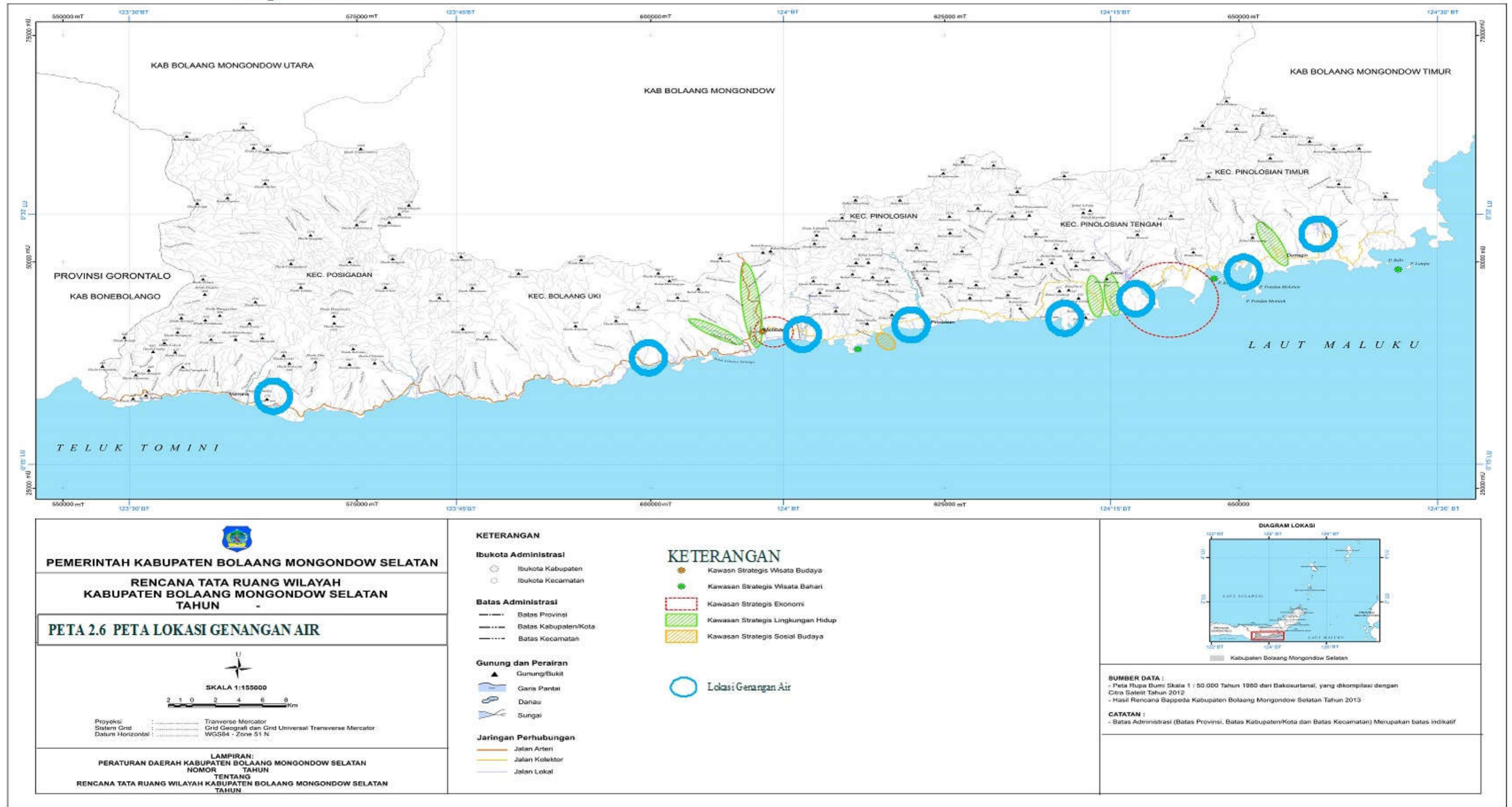
Sumber : Dinas PU Cipta Karya Tahun 2015 dan Analisa Pokja Sanitasi 2016

Tabel 2.15.
Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No	Jenis Prasarana/ Sarana	Satuan	Bentuk Penampang saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				B (m)	H (m)	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)
1	Saluran Primer Kawasan	m	Trapesium	3,5	4,8	5.400	0	2 kali
	-	m	Trapesium	1,6	1,75	2.000	0	2 kali
	-	m	Trapesium	1,6	1,75	3.800	0	2 kali
	Bangunan Pelengkap							
	- Rumah Pompa	unit	-	0	0	0	0	-
	- Pintu Air	unit	-	0	0	0	0	-
	- Kolam Retensi	unit	-	0	0	0	0	-
	- Trash Rack/ Saringan Sampah	unit	-	0	0	0	0	-
2	Saluran Primer Kawasan	m	Trapesium	3,5	4,8	4.600	0	2 kali
	- Saluran Sekunder	m	Trapesium	1,6	1,75	3.300	0	2 kali
	- Saluran Sekunder	m	Trapesium	1,6	1,75	2.100	0	2 kali
	Bangunan Pelengkap							
	- Rumah Pompa	unit	-	0	0	0	0	-
	- Pintu Air	unit	-	0	0	0	0	-
	- Kolam Retensi	unit	-	0	0	0	0	-
	- Trash Rack/ Saringan Sampah	unit	-	0	0	0	0	-

Sumber : Dinas PU Cipta Karya Tahun 2015

Peta 2.6. Peta Lokasi Genangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan



2) Kelembagaan dan Peraturan

Kondisi pengelolaan drainase di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan saat ini dapat dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur maupun aspek non infrastruktur. Dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur, masih belum menyentuh semua daerah permukiman di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemukiman Prasarana Wilayah.

Selain dari itu sistem pengelolaan drainase juga melibatkan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten (BLH), dimana pencegahan pencemaran air merupakan salah satu prioritas pada jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup. Sebagai salah satu utilitas suatu daerah/wilayah, drainase tentu saja harus direncanakan dan dibangun sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki serta berkesesuaian dengan utilitas lain maupun fungsi lahan yang ada. Berdasarkan hal tersebut maka eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), memiliki intervensi yang tidak kecil terutama karena sistem pengelolaan drainase harus dipandang sebagai bagian dari sistem suatu wilayah, baik sarana prasarana fisik maupun aspek non fisik lainnya.

Pembangunan dan pemeliharaan drainase perkotaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan upaya masyarakat lebih kepada usaha tiap individu untuk membuat drainase sederhana berupa galian tanah depan rumah masing-masing dan biasanya tidak berfungsi karena tidak semua rumah dalam jalur tersebut membuat drainase sederhana yang serupa. Asumsi yang terbentuk bahwa masalah drainase adalah kewajiban pemerintah membuat sebagian masyarakat tidak peduli dengan sistem drainase.

2.4 Area Berisiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi

Risiko sanitasi dapat diartikan terjadinya penurunan kualitas hidup, kesehatan, bangunan dan atau lingkungan akibat rendahnya akses terhadap layanan sektor sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam penentuan area berisiko sanitasi ditetapkan berdasarkan data Sekunder, Penilaian SKPD dan data studi EHRA, sehingga diperoleh gambaran area berisiko sanitasi

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan dan drainase perkotaan.

2.4.1 Area Beresiko dan Permasalahan air limbah Domestik

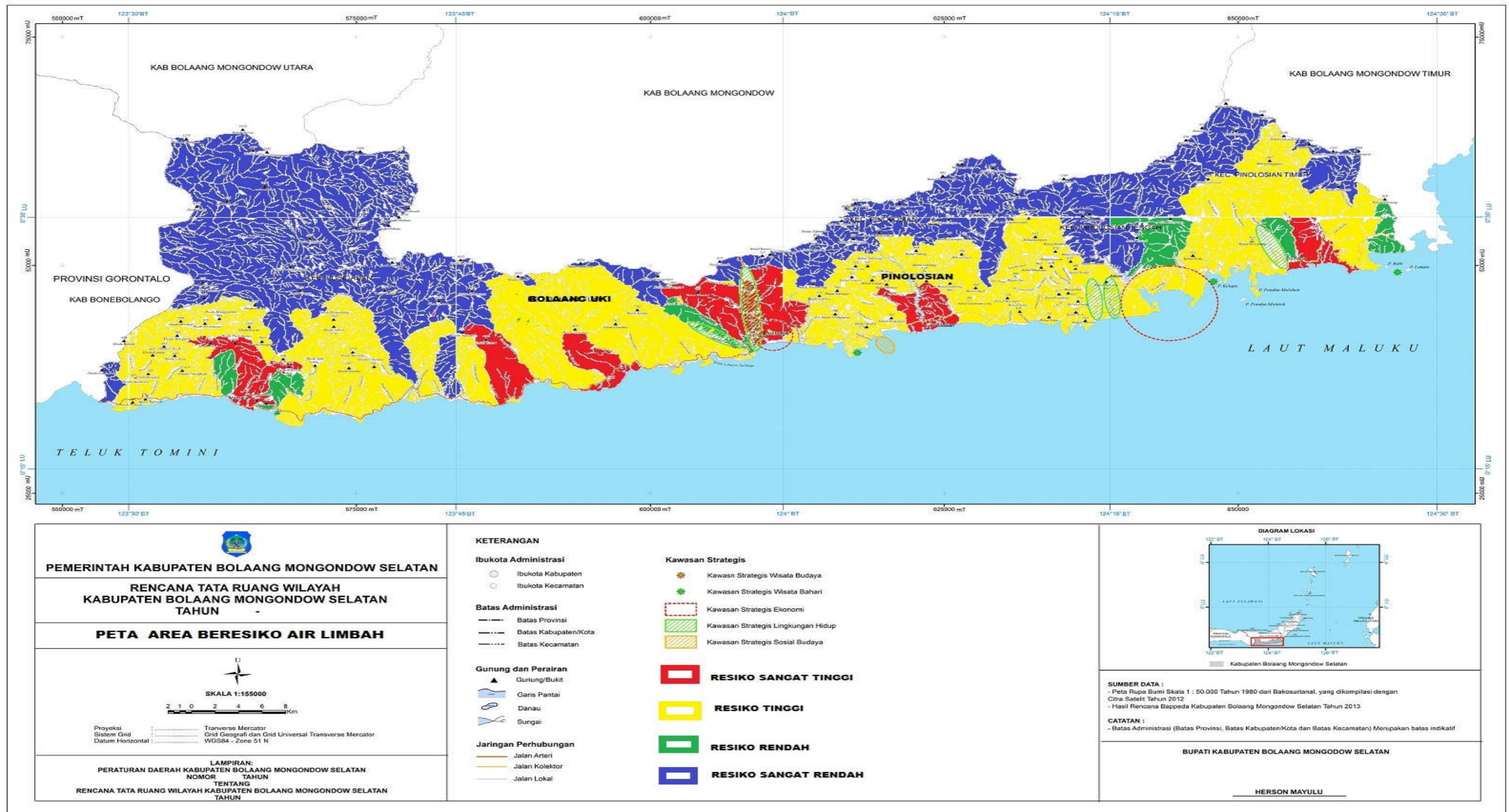
Untuk area beresiko air limbah domestik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih banyak desa yang mempunyai kondisi rawan sanitasi dengan resiko sangat tinggi maupun resiko tinggi ini didapat dari data studi EHRA, dan persepsi SKPD sesuai dengan kondisi desa yang ada (*lihat peta 2.7 Peta area beresiko air limbah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*).

Pada peta area beresiko sanitasi air limbah domestik yang merupakan area beresiko sangat tinggi ada 10 Desa dan yang termasuk resiko tinggi ada 56 Desa. Sedangkan Desa lainnya merupakan area beresiko rendah dan sangat rendah. Hal ini dikarenakan, prasarana air limbah domestik belum memadai yang memicu perilaku buang air besar sembarangan. (*Lihat Tabel 2.16. Area Beresiko Sanitasi Air Limbah Domestik*).

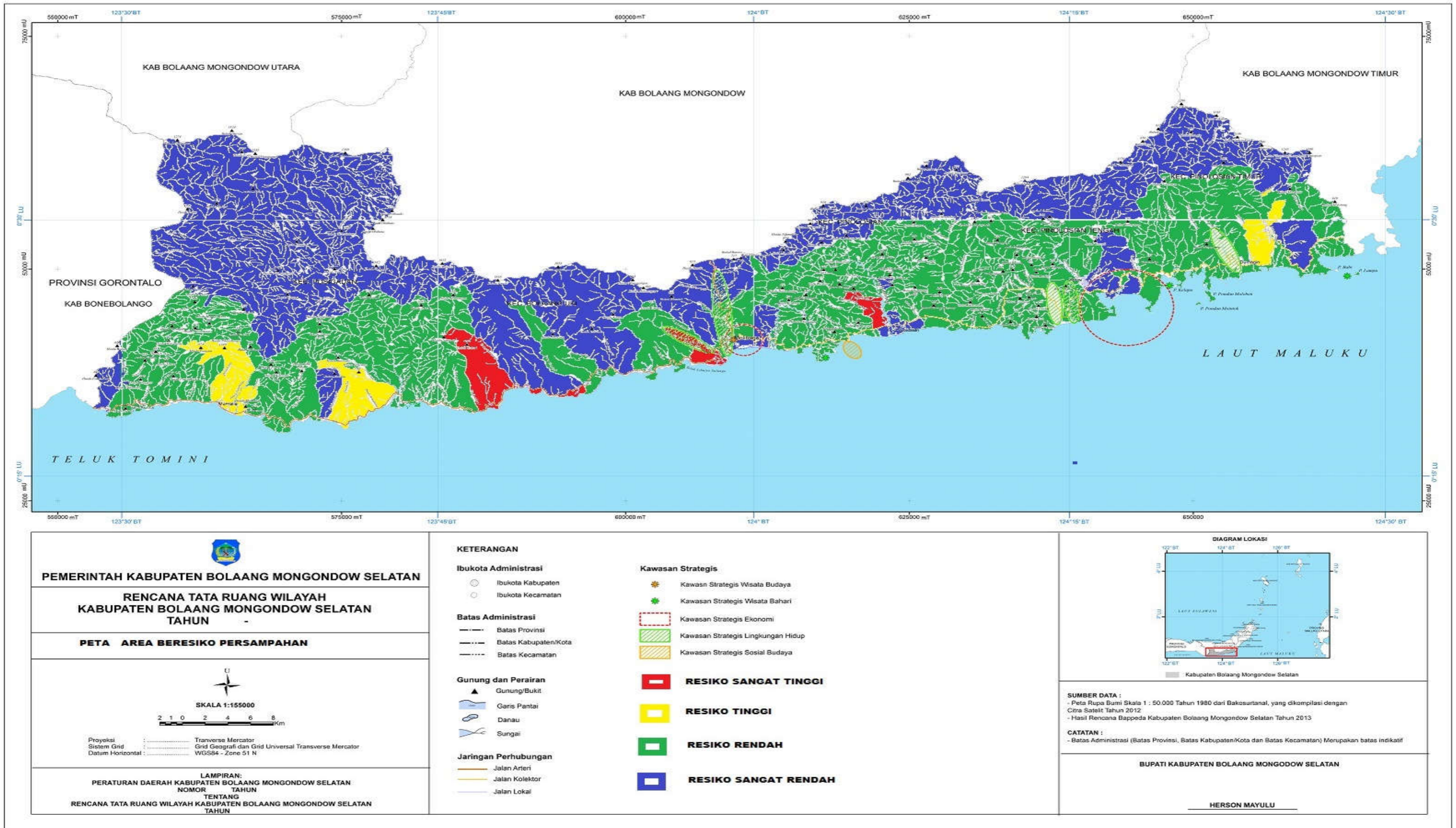
Dengan melihat kondisi sanitasi pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, derajat permasalahan yang ada tergolong tinggi. Sebagian besar pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menggunakan on-site system dan sebagian limbah buangan langsung dialirkan tanpa pengelolaan terlebih dahulu sehingga mencemari air tanah dan sungai.

Sistem kelembagaan sanitasi masih lemah, kondisi ini menuntut peningkatan kapasitas cakupan layanan pengelolaan air limbah, terutama dalam meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, sehingga tatanan pengelolaan air limbah domestik dapat memenuhi harapan. Dalam rangka mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat maka perlu dukungan media komunikasi dalam memberi informasi mengenai pentingnya hidup bersih dan sehat di masyarakat.

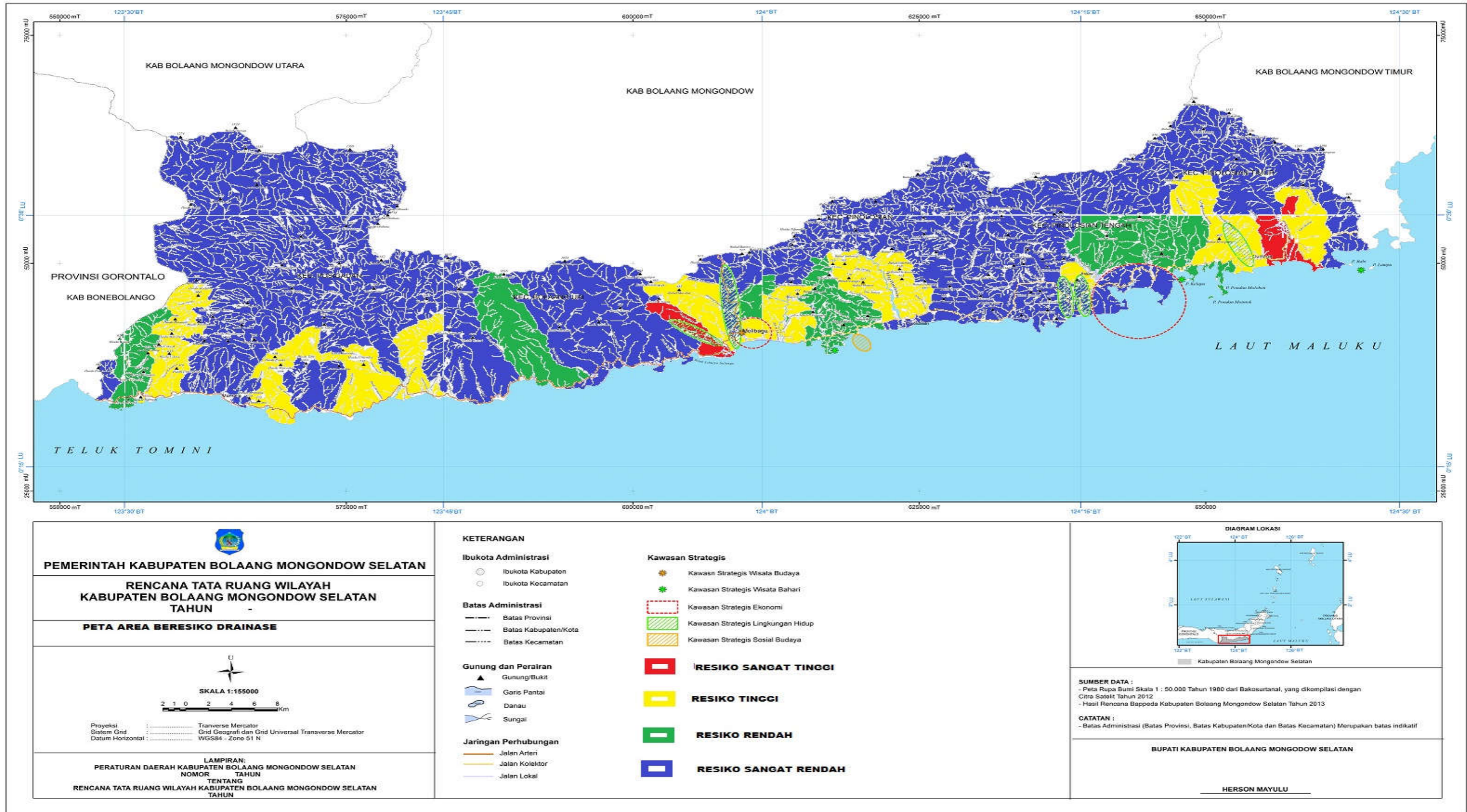
Peta 2.7. Peta Area Beresiko Air Limbah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan



Peta 2.8. Peta Area Beresiko Persampahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan



Peta 2.8. Peta Area Beresiko Drainase Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan



Tabel 2.16.
Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik

No	Area Berisiko	Wilayah Prioritas	
		KECAMATAN	DESA
1	Resiko 4	Bolaang Uki	Desa Dudepo
2	Resiko 4	Bolaang Uki	Desa Molibagu
3	Resiko 4	Bolaang Uki	Desa Popodu
4	Resiko 4	Bolaang Uki	Desa Sondana
5	Resiko 4	Bolaang Uki	Desa Tabilaa
6	Resiko 4	Posigadan	Desa Momalia II
7	Resiko 4	Pinolosian	Desa Pinolosian
8	Resiko 4	Pinolosian Timur	Desa Modisi
9	Resiko 4	Helumo	Desa Duminanga
10	Resiko 4	Tomini Raya	Desa Milangodaa
11	Resiko 3	Bolaang Uki	Desa Tangagah
12	Resiko 3	Bolaang Uki	Desa Dudepo Barat
13	Resiko 3	Bolaang Uki	Desa Pinolantungan
14	Resiko 3	Bolaang Uki	Desa Salongo Barat
15	Resiko 3	Bolaang Uki	Desa Salongo
16	Resiko 3	Bolaang Uki	Desa Toluaya
17	Resiko 3	Bolaang Uki	Desa Pintadia
18	Resiko 3	Bolaang Uki	Desa Tolondadu I
19	Resiko 3	Bolaang Uki	Desa Tolondadu
20	Resiko 3	Bolaang Uki	Desa Tolondadu II
21	Resiko 3	Posigadan	Desa Lion
22	Resiko 3	Posigadan	Desa Saibuah
23	Resiko 3	Posigadan	Desa Tonala
24	Resiko 3	Posigadan	Desa Meyambanga
25	Resiko 3	Posigadan	Desa Momalia I
26	Resiko 3	Posigadan	Desa Momalia III
27	Resiko 3	Posigadan	Desa Iloheluma
28	Resiko 3	Posigadan	Desa Pilolahunga
29	Resiko 3	Posigadan	Desa Luwoo
30	Resiko 3	Posigadan	Desa Inosota
31	Resiko 3	Posigadan	Desa Sakti
32	Resiko 3	Posigadan	Desa Sinombayuga
33	Resiko 3	Pinolosian	Desa Linawan
34	Resiko 3	Pinolosian	Desa Linawan I
35	Resiko 3	Pinolosian	Desa Nunuk

36	Resiko	3	Pinolosian	Desa Ilomata
37	Resiko	3	Pinolosian	Desa Pinolosian Selatan
38	Resiko	3	Pinolosian	Desa Tolotoyon
39	Resiko	3	Pinolosian	Desa Kombot
40	Resiko	3	Pinolosian	Desa Lungkap
41	Resiko	3	Pinolosian Tengah	Desa Adow
42	Resiko	3	Pinolosian Tengah	Desa Adow Selatan
43	Resiko	3	Pinolosian Tengah	Desa Mataindo
44	Resiko	3	Pinolosian Tengah	Desa Deaga
45	Resiko	3	Pinolosian Tengah	Desa Tobayagan
46	Resiko	3	Pinolosian Tengah	Desa Tobayagan Selatan
47	Resiko	3	Pinolosian Timur	Desa Matandoi
48	Resiko	3	Pinolosian Timur	Desa Matandoi Selatan
49	Resiko	3	Pinolosian Timur	Desa Dumagin B
50	Resiko	3	Pinolosian Timur	Desa Dumagin A
51	Resiko	3	Pinolosian Timur	Desa Pidung
52	Resiko	3	Pinolosian Timur	Desa Dayow
53	Resiko	3	Pinolosian Timur	Desa Onggunoi
54	Resiko	3	Pinolosian Timur	Desa Posilagon
55	Resiko	3	Pinolosian Timur	Desa Iligon
56	Resiko	3	Helumo	Desa Pangia
57	Resiko	3	Helumo	Desa Soputa
58	Resiko	3	Helumo	Desa Bakida
59	Resiko	3	Helumo	Desa Biniha
60	Resiko	3	Helumo	Desa Biniha Timur
61	Resiko	3	Helumo	Desa Motolohu
62	Resiko	3	Helumo	Desa Biniha Selatan
63	Resiko	3	Helumo	Desa Trans Pato'a
64	Resiko	3	Helumo	Desa Halabolu
65	Resiko	3	Tomini Raya	Desa Milangodaa Barat
66	Resiko	3	Tomini Raya	Desa Tolutu

Sumber : Penetapan Area Berisiko Sanitasi Tahun 2016

Permasalahan mendesak yang menjadi prioritas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada sektor air limbah domestik lebih kepada penyediaan sarana dan prasarana seperti sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
(Lihat Tabel 2.17. Permasalahan Mendesak Pengelolaan Air Limbah Domestik)

Tabel 2.17.

Permasalahan Mendesak Pengelolaan Air Limbah Domestik

No	Permasalahan Mendesak
1.	Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interface-pengolahan awal-pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis
Babs	60% (7.353 kk)
	Pencemaran air tanah dan sungai dikarenakan buangan dari rumah tangga langsung dialirkan tanpa pengelolaan terlebih dahulu. Truk Tinja belum ada IPLT sementara persiapan pembangunan Perda tentang air limbah belum ada
2.	Aspek Non Teknis : Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, serta Komunikasi
	Masih rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat perlunya dilakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala.
	Pendanaan baik yang bersumber dari pemerintah maupun pihak swasta tidak sebanding dalam memaksimalkan cakupan layanan air limbah yang aman terhadap lingkungan.

Sumber : Kajian Pokja Sanitasi Tahun 2016

2.4.2 Area Berisiko dan Permasalahan Persampahan

Area berisiko sanitasi untuk sub sektor persampahan dari 81 Desa, yang masuk kategori berisiko sangat tinggi sebanyak 4 Desa sedangkan area berisiko tinggi sebanyak 6 Desa. Permasalahan utama yang ditemukan yakni belum teraturnya pengelolaan sampah rumah tangga dan masih ada masyarakat membuang sampah rumah tangga di lahan kosong, sungai, dan drainase. (Lihat Tabel 2.18. Area Berisiko Sanitasi Persampahan)

Tabel 2.18.
Area Berisiko Sanitasi Persampahan

No	Area Berisiko	Wilayah Prioritas	
		KECAMATAN	DESA
1	Risiko 4	BOLAANG UKI	SALONGO
2	Risiko 4	PINOLOSIAN TENGAH	KOMBOT
3	Risiko 4	HELUMO	BINIHA
4	Risiko 4	TOMINI RAYA	MILANGODAA
5	Risiko 3	POSIGADAN	MOMALIA II
6	Risiko 3	POSIGADAN	SAKTI
7	Risiko 3	PINOLOSIAN TIMUR	MATANDOI
8	Risiko 3	PINOLOSIAN TIMUR	DAYOW
9	Risiko 3	PINOLOSIAN TIMUR	ONGGUNOI
10	Risiko 3	HELUMO	DUMINANGA

Sumber : Penetapan Area Berisiko Sanitasi Tahun 2016

Pemilihan sampah mulai dari sumbernya dapat meminimalisir jumlah timbunan sampah, Keterbatasan dan masih kurang optimalnya sarana bangunan 3R menjadi salah satu permasalahan cukup penting selain dari perilaku masyarakat. Disamping itu, sampah yang sudah dipilah dijadikan satu kembali pada saat pengangkutan. (Lihat Tabel 2.19. Permasalahan Mendesak Pengelolaan Persampahan)

Tabel 2.19.
Permasalahan Mendesak Pengelolaan Persampahan

No	Permasalahan Mendesak
	1. Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interface-pengolahan awal-pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis
	Penanganan sampah skala rumah tangga masih dengan membakar dan membuang ke lahan kosong, saluran dan sungai.
	Sampah yang sudah dipilah disatukan kembali pada saat pengangkutan.
	2. Aspek Non Teknis : Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/ Swasta, serta Komunikasi
	Peran swasta dalam pengelolaan sampah dan penyediaan bangunan TPS 3R belum optimal.
	Regulasi mengenai persampahan belum ada, mengenai pengaturan secara teknis serta pelayanan yang dapat menunjang kegiatan pengelolaan persampahan

Sumber : Kajian Pokja Sanitasi Tahun 2016

2.4.3 Area Berisiko dan Permasalahan Drainase Perkotaan

Kondisi topografi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang relatif berbukit dan daerah datar yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Nampak area berisiko sanitasi drainase perkotaan sangat tinggi dan area berisiko sangat tinggi di 3 Desa dari 15 Desa, sedangkan didaerah yang tinggi ada 12 desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. (Lihat Tabel 2.20. Area Berisiko Sanitasi Drainase Perkotaan)

Tabel 2.20.
Area Berisiko Sanitasi Drainase

No	Area Berisiko	Wilayah Prioritas	
		KECAMATAN	DESA
1	Risiko 4	BOLAANG UKI	SALONGO
2	Risiko 4	PINOLOSIAN TIMUR	MATANDOI
3	Risiko 4	PINOLOSIAN TIMUR	ONGGUNOI
4	Risiko 3	BOLAANG UKI	TOLUAYA
5	Risiko 3	BOLAANG UKI	SONDANA
6	Risiko 3	BOLAANG UKI	TOLONDADU I
7	Risiko 3	BOLAANG UKI	TOLONDADU
8	Risiko 3	POSIGADAN	SAIBUAH
9	Risiko 3	POSIGADAN	LUWOO
10	Risiko 3	PINOLOSIAN	LINAWAN
11	Resiko 3	PINOLOSIAN	NUNUK
12	Resiko 3	PINOLOSIAN TIMUR	DUMAGIN B
13	Resiko 3	PINOLOSIAN TIMUR	POSILAGON
14	Resiko 3	HELUMO	BINIHA
15	Resiko 3	PINOLOSIAN TENGAH	MATAINDO

Sumber : Penetapan Area Berisiko Sanitasi Tahun 2016

Lingkungan permukiman yang memiliki drainase yang baik tidak menjamin terwujudnya lingkungan bersih dan sehat tapi juga diperlukan perilaku yang baik di masyarakat. Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan untuk mendukung terpenuhinya prasarana drainase yang sesuai dengan harapan. Disamping itu, dalam menentukan arah kebijakan mengatasi genangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan belum memiliki peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan drainase secara teknis dan operasional. (Lihat Tabel 2.21. *Permasalahan Mendesak Pengelolaan Drainase*)

Tabel 2.21.
Permasalahan Mendesak Pengelolaan Drainase

No	Permasalahan Mendesak
	1. Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interface-pengolahan awal-pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis
	Penyempitan penampang drainase, baik yang disebabkan oleh sedimentasi maupun sampah.
	2. Aspek Non Teknis : Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/ Swasta, serta Komunikasi
	Regulasi khusus drainase belum ada, yang mengatur layanan secara teknis dan operasional.

Sumber : Kajian Pokja Sanitasi Tahun 2016

BAB 3

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

3.1. Visi dan Misi Sanitasi

Visi dan misi sanitasi telah dirumuskan untuk memberi arahan bagi pengembangan sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Keterkaitan antara visi dan misi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan visi dan misi sanitasi sangat mendukung pencapaian misi Kabupaten terutama misi yang pertama dan ketiga. (Lihat Tabel 3.1. Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)

Tabel 3.1.
Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

VISI KABUPATEN	MISI KABUPATEN	VISI SANITASI KABUPATEN	MISI SANITASI KABUPATEN
Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang Religius, Berbudaya, Bermartabat, Maju dan Sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih melalui terwujudnya pembangunan bidang hukum, aparatur daerah, komunikasi dan informasi, serta ketentraman dan ketertiban 2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM). 3) Meningkatkan kegiatan ekonomi daerah melalui terwujudnya pembangunan bidang pertanian, 	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Sanitasi Layak di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021	<p>Misi Air Limbah Domestik</p> <ul style="list-style-type: none"> -Menyusun peraturan Daerah (Perda) dan masterplan tentang pengelolaan sektor air limbah -Menyiapkan kerangka regulasi dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah -Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana air limbah untuk cakupan layanan pengelolaan air limbah dengan sistem setempat (On-Site) dan terpusat (Off-Site). -Memperkuat dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama kelembagaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah -Meningkatkan pemahaman dan peran masyarakat dan swasta terhadap pentingnya pengelolaan air limbah yang ramah lingkungan. -Mengoptimalkan dan meningkatkan sumber pendanaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman.

	<p>peternakan dan kehutanan, sumber daya kelautan, pertambangan, transportasi, perdagangan, pengembangan usaha mikro</p> <p>4) Meningkatkan kapasitas pengembangan potensi wilayah melalui terwujudnya pembangunan pedesaan, penataan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup.</p>		<p>Misi Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Persampahan - Mengembangkan kerangka regulasi tentang persampahan untuk memperkuat dan memantapkan pengelolaan persampahan - Mengoptimalkan dan meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. - Meningkatkan peran serta dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan. - Meningkatkan dan Mendorong kemitraan dengan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan. - Mengefektifkan dan meningkatkan kerjasama kelembagaan dalam pengelolaan persampahan. - Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan. <p>Misi Drainase Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dokumen perencanaan drainase yang komprehensif dan terintegrasi didukung dengan kebijakan daerah - Meningkatkan Pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase sesuai fungsi dan memperhatikan kondisi lingkungan - Meningkatkan Penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sistem drainase - Mendorong dan Meningkatkan kesadaran peran masyarakat dan swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan drainase - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana drainase
--	---	--	--

Sumber : Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016

3.2. Pentahapan Pengembangan Sanitasi

Dalam pentahapan pengembangan sanitasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disusun dengan melakukan analisis terhadap kondisi wilayah saat ini serta arah pengembangan secara menyeluruh berdasarkan dokumen perencanaan yang telah ada.

Makin meningkatnya Perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan pada saat ini memerlukan antisipasi pengelolaan lingkungan yang baik agar tidak mencemari dan menurunkan kualitas lingkungan, terutama air tanah dan air permukaan. Untuk itu perlu disusun pentahapan pembangunan mulai dari jangka pendek, jangka menengah hingga pembangunan jangka panjang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi pada air limbah, persampahan dan drainase perkotaan.

3.2.1. Tahapan Pengembangan Sanitasi

3.2.1.1. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik

Dilihat dai kondisi yang ada pada saat ini untuk tahapan pengembangan air limbah domestik dikaji berdasarkan beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan dalam memecahkan permasalahan yang terjadi yaitu kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah, karakteristik tata guna lahan, serta risiko kesehatan lingkungan. Analisis yang dilakukan menghasilkan suatu peta yang menggambarkan zona dan sistem pengelolaan air limbah yang akan menjadi bahan untuk tahapan pengembangan air limbah domestik.

Berdasarkan kondisi tersebut serta memperhatikan faktor-faktor lain seperti rencana tata guna lahan dan kondisi tanah, maka sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dibagi ke dalam 3 zonasi sistem.

(Lihat Peta 3.1. Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik)

Dengan memperhatikan isu pokok sanitasi air limbah domestik, permasalahan mendesak sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai berikut:

1. Kelembagaan yang menangani masalah sanitasi belum tertata dengan baik serta belum dikuatkan dengan perda.
2. Dari hasil survey EHRA diketahui bahwa tingkat kepemilikan jamban, sistem pengelolaan sanitasi air limbah masih rendah yaitu hanya 42,86%

atau kurang dari 50%, untuk akses jamban terhadap jamban yang tidak layak 18,59% sekitar 3,601 KK.

3. Posting pendanaan lewat APBD untuk masalah sanitasi khususnya air limbah masih kurang.
4. MCK yang di bangun belum sesuai standard (kebanyakan septic tank adalah tipe Cubluk yang tidak pernah disedot tinja) dimana tipe seperti ini dapat mencemari Lingkungan
5. Saluran drainase lingkungan untuk limbah masih kurang
6. Penyuluhan untuk tidak BABS oleh instansi terkait masih kurang
7. Bahwa hampir semua pengelolaan air limbah domestik di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah menggunakan *on site system* dengan tingkat teknologi sederhana, sementara pengelolaan dengan *off site system* (terpusat) masih belum berkembang, sistem jaringan belum terstruktur dengan baik, di antaranya pembuangan akhir dialirkan ke sungai atau saluran drainase terdekat. Sarana IPAL atau IPLT rencana akan dibangun pada tahun 2017

Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagian besar berupa pegunungan di bagian utara serta hampir sepanjang perbatasan di bagian utara merupakan wilayah hutan lindung yang otomatis wilayah tersebut dilarang untuk area pemukiman penduduk. Dan untuk beberapa wilayah yang direncanakan 1 s/d 15 tahun ke depan termasuk wilayah perdagangan dan wisata (CBD) direncanakan untuk menggunakan system Off Site medium serta off site jangka panjang.

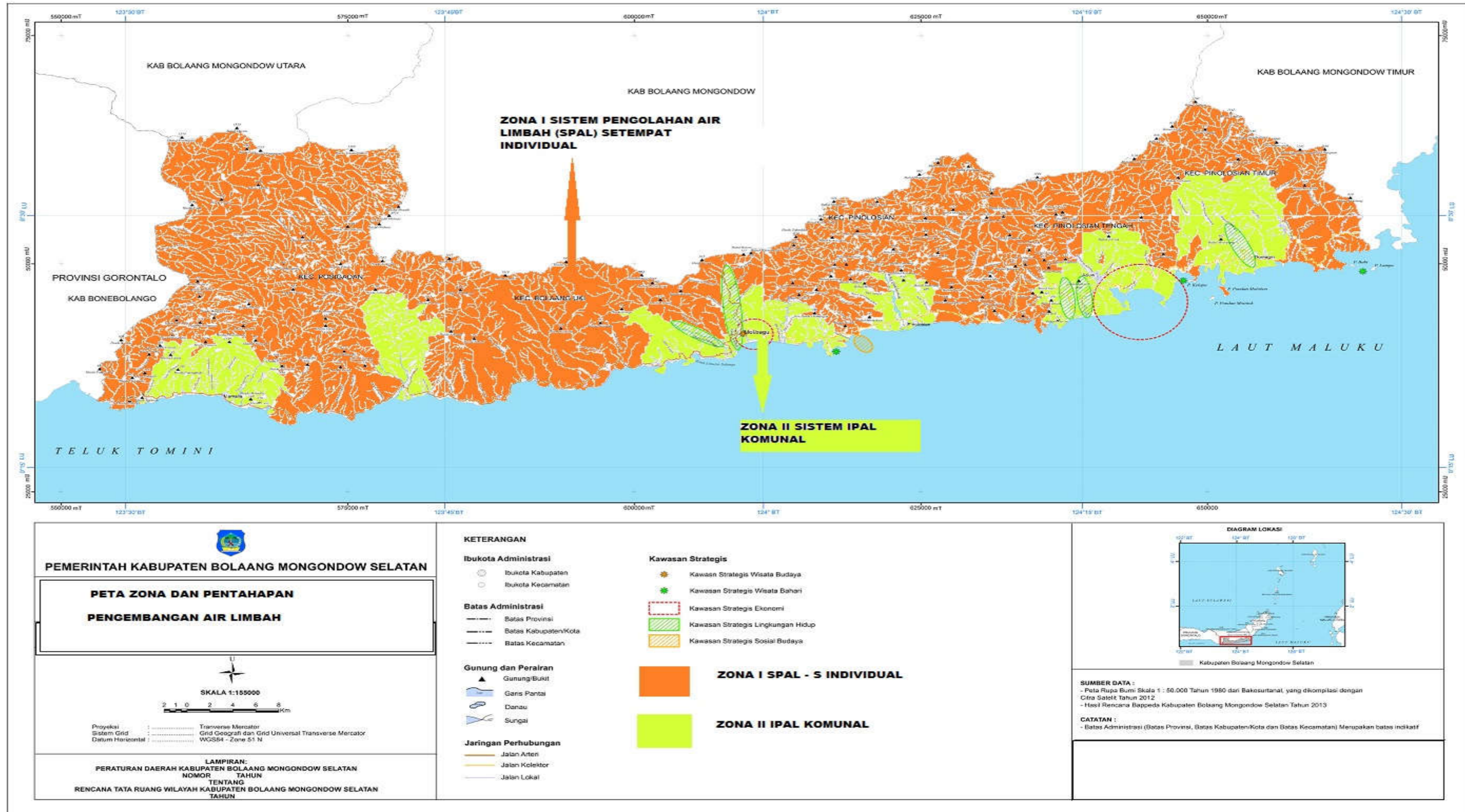
Hasil pemetaan tersebut dihasilkan dari peta yang menggambarkan kebutuhan sistem pengelolaan air limbah untuk perencanaan pengembangan sistem. Peta tersebut terbagi dalam beberapa zonasi, dimana zona tersebut sekaligus merupakan dasar bagi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam merencanakan pengembangan sanitasi. Rencana pengembangan tersebut diilustrasikan sebagai berikut:

- Zona 1, merupakan area SPAL – Setempat individual yaitu dengan tingkat kepadatan rendah yang dapat diatasi dalam jangka pendek melalui pilihan sistem setempat (*on-site*) dalam skala rumah tangga. Dengan opsi teknologi Jamban tangki septik SNI dan penanganan untuk perubahan perilaku dengan

pemicuan. Desa yang masuk dalam zona ini adalah Desa Tangagah. Dudepo Barat, Dudepo, Pinolantungan, Salongo Barat, salongo Timur, Soguo, Pintadia, Tolondadu II, Molosipat, Lion, Mangadaa, Tonala, Meyambaga, Meyambaga Timur, Momalia III, Iloheluma, Pilolahunga, Inosota, Sakti, Nunuk, Pinolosian Selatan, Tolotoyon, Kombot Timur, Lungkap, Adow Selatan, Torosik, Mataindo Utara, Deaga, Tobayagan, Tobayagan Selatan, Matandoi Selatan, Modisi, Perjuangan, Iligon, Pangia, Soputa, Bakida, Biniha Timur, Motolohu, Biniha Selatan, Trans Patoa, Halabolu, Milangodaa, Milangodaa Utara, Milangodaa Barat, Tolotu, Nunuka Raya, dan Desa Botuliodu.

- Zona 2, merupakan area dengan tingkat risiko sanitasi yang dapat diatasi dalam jangka menengah dengan perubahan perilaku. Karena merupakan daerah kepadatan penduduk kategori sedang maka pemilihan sistemnya adalah sistem Komunal. Dimana suatu sistem pengolahan air limbah menggunakan jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan ke suatu tempat selanjutnya untuk diolah. Desa yang masuk dalam zona ini adalah Toluaya, Tolondadu, saibuah, Luwoo, Linawan, Linawan I, Nunuk, Ilomata, Mataindo, Matandoi, Dumagin A, Pidung, Onggunoi, Onggunoi selatan, Posilagon, Biniha, dan Desa Pakuku Jaya, Desa Salongo, Desa Molibagu, Desa Popodu, Desa Sondana, Desa Tolondadu I Desa Tabilaa, Desa Momalia II, Desa Momalia I, Desa Sinombayuga, Desa Pinolosian, Desa Kombot, Desa Adow, Desa Dumagin B, Desa Dayow dan Desa Duminanga.

Peta 3.1 Peta Zona dan Pentahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan



Dengan ilustrasi dan deskripsi seperti digambarkan diatas maka tahapan pengembangan air limbah domestik dibagi dalam 3 tahapan, yaitu:

1. Tahapan Jangka Pendek

Dalam 2 tahun, diharapkan akses sanitasi air limbah domestik yang layak dan berwawasan lingkungan mencapai 58,60%

2. Tahapan Jangka Menengah

Untuk Jangka menengah diharapkan cakupan layanan air limbah dapat ditingkatkan menjadi 78,49%. Diharapkan pula Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah ODF 100% pada tahun 2021. Hal ini dapat di capai melalui program-program pemucuan dan kampanye kesehatan di tingkat Desa.

3. Tahapan Jangka Panjang

Untuk Jangka Panjang diharapkan akses air limbah yang layak dapat ditingkatkan menjadi 100%. Untuk MCK++ tidak lagi dikembangkan mengingat kecenderungan masyarakat lebih memilih menggunakan jamban pribadi. *(lihat Tabel 3.2. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)*

Tabel 3.2.
Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)	Target cakupan layanan (%)		
			Jangka pendek (s/d 2018)	Jangka menengah (s/d 2021)	Jangka panjang (s/d 2025)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
A	Buang Air Besar Sembarangan (BABs)	38,20	26,74	0	0
B	Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (On-Site)	53,56	58,60	78,49	78,49
1	Cubluk /Tangki Septik individual belum aman	19,58	11,75	5,00	5,00
2	Tangki Septik individual	23,08	34,63	55,40	55,40
3	Tangki Septik Komunal (≤ 10 KK)	-	-	-	-
4	MCK	10,90	12,23	18,09	18,09
C	Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) Terpusat (Off-site)	8,24	14,66	21,51	21,51
1	Tangki Septik Komunal (≥ 10 KK)	2,04	3,50	7,00	7,00
1	IPAL Komunal	6,20	11,16	14,51	14,51
2	IPAL Kawasan	-	-	-	-
3	IPAL Kota	-	-	-	-
Sub Total		100	100	100	100

Sumber : Hasil Kajian studi EHRA dan analisa Pokja Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016

3.2.1.2. Tahapan Pengembangan Persampahan

Berdasarkan kriteria yang ada dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), wilayah pengembangan pelayanan persampahan dapat diidentifikasi. Ada dua kriteria utama dalam penetapan prioritas penanganan persampahan, yaitu tata guna lahan/klasifikasi wilayah dan kepadatan penduduk. Kedua kriteria tersebut sangat berhubungan dengan aktivitas penghuninya yang akan mempengaruhi perhitungan jenis dan volume timbulan sampah. Dari hasil

analisis yang didasarkan pada kedua kriteria tersebut, rencana pengembangan persampahan diilustrasikan sebagai berikut:

- Zona 1, merupakan area penanganan jangka menengah ke panjang, umumnya berada di area-area dengan kepadatan penduduk lebih kecil 25 orang/ha dan bukan fungsi pelayanan jasa dan perdagangan dengan cakupan secukupnya. Zona ini meliputi Kecamatan Helumo, Kecamatan Pinolosian dan Kecamatan Bolaang Uki.
- Zona 2, merupakan area urban dengan tingkat kepadatan lebih besar 25 - 100 orang/ha rural/urban, yang dapat diatasi dalam jangka pendek ke menengah dengan opsi pengembangan pelayanan persampahan hingga 100% dengan metode pengumpulan langsung (RT-TPS-TPA). Opsi teknologi penyediaan sarana pengumpulan dan pengolahan sampah sementara. Zona ini meliputi Desa Popodu, Desa Molibagu, Desa Salongo, Desa Sondana
- Zona 3, merupakan area pusat pelayanan dan kawasan permukiman padat dan kawasan perdagangan (CBD) yang harus ditangani secara jangka pendek dengan opsi pengembangan pelayanan persampahan hingga 100% dengan metode pengumpulan langsung (RT-TPS-TPA). (*Lihat Peta 3.2. Peta Tahapan Pengembangan Persampahan*)

Berdasarkan ilustrasi seperti yang tergambar pada peta tahapan pengembangan persampahan maka tahapan pengembangan dibagi dalam 3 tahapan, yaitu:

1. Tahapan Jangka Pendek

Untuk tahapan pengembangan persampahan jangka pendek, capaian yang diharapkan untuk sampah yang terangkut baik secara langsung maupun tidak langsung 30,50%

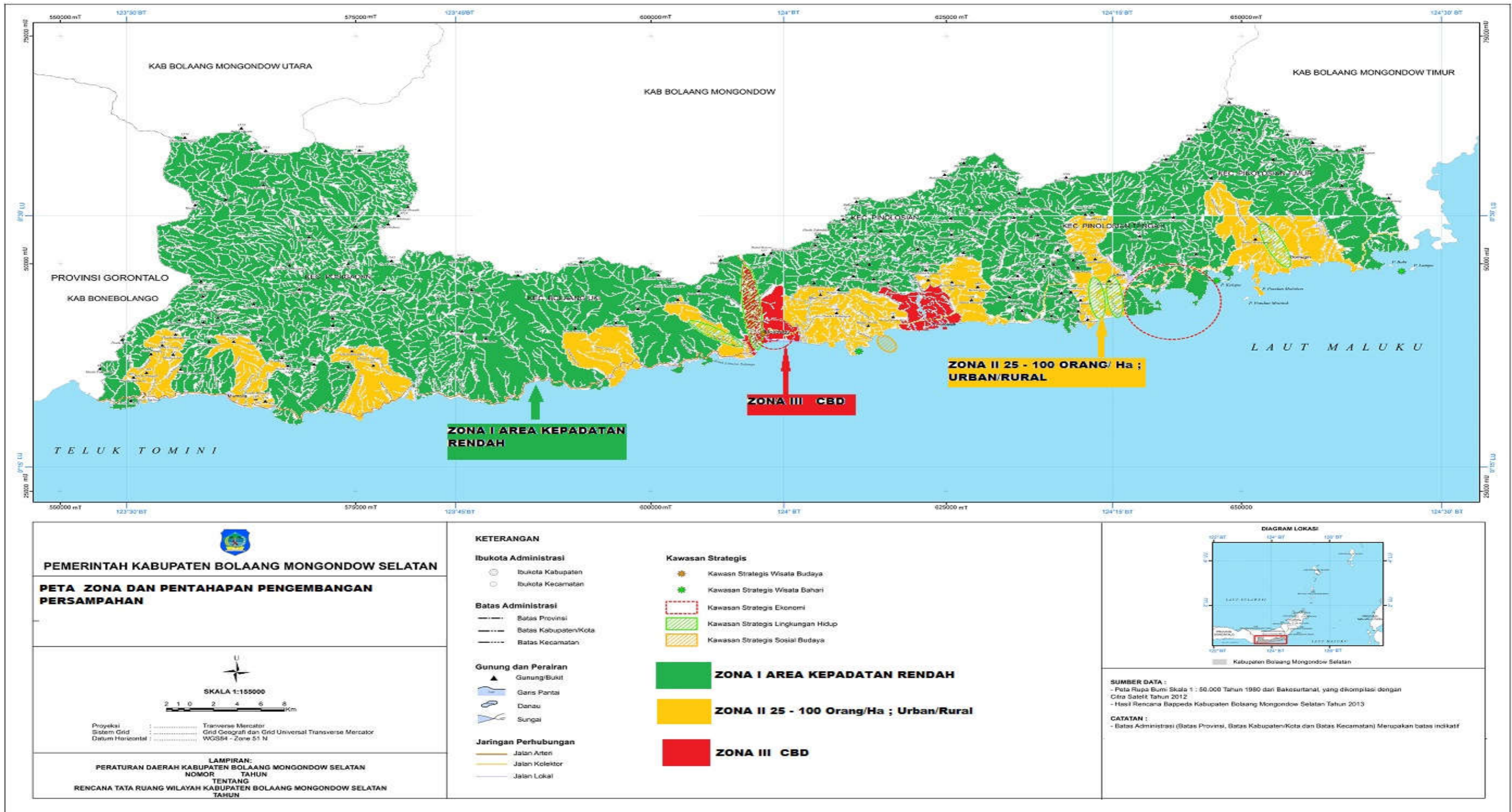
2. Tahapan Jangka Menengah

Pada tahun 2021 cakupan layanan persampahan ditargetkan mencapai 100%. Dimana penanganan sampah 54,20% dan fasilitas reduksi sampah 23,72%.

3. Tahapan Jangka Panjang

Capaian jangka panjang selama 10 tahun ditargetkan cakupan layanan persampahan mencapai 100% dengan penanganan sampah 54,20% dan fasilitas reduksi sampah 23,72%. (*Lihat Tabel 3.3. Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*)

Peta 3.2 Peta Zona dan Pentahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan



Tabel 3.3.
Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

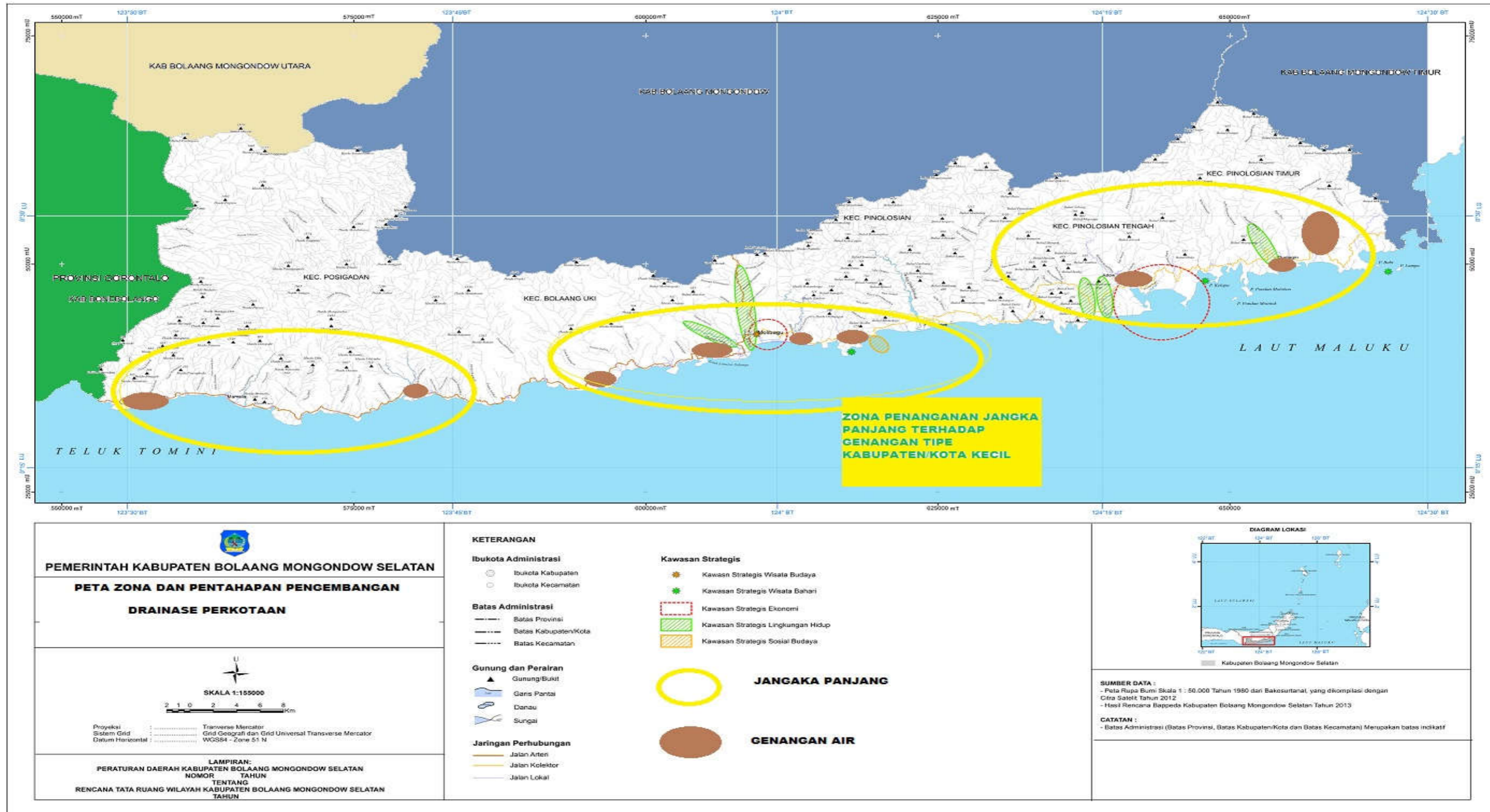
No	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)	Target cakupan layanan (%)		
			Jangka pendek (s/d 2018)	Jangka menengah (s/d 2021)	Jangka panjang (s/d 2025)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	Prosentasi sampah terangkut ke TPA	17,43	30,50	54,90	54,90
2	Prosentase sampah tereduksi melalui 3R	2,80	19,60	23,72	23,72
3	Prosentasi Sampah dikelola mandiri oleh masyarakat di sumber	7,10	14,20	21,44	21,44
4	Prosentasi Sampah Tidak Terolah	72,67	35,70	0,00	0,00
Sub Total		100	100	100	100

Sumber : Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016

3.2.1.3. Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan

Pengembangan sub sektor drainase memerlukan analisis yang tepat untuk menentukan pengembangan sistem yang sesuai agar pengembangan sistem drainase dapat berjalan dengan efektif dan berkesinambungan. Penentuan daerah prioritas ini disusun berdasarkan beberapa kriteria seleksi yaitu: kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah, peruntukan wilayah serta risiko kesehatan lingkungan. Sistem pengembangan drainase perkotaan dengan zona penanganan jangka panjang terhadap genangan. (Lihat Peta 3.3. Peta Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan)

Peta 3.3 Peta Zona dan Pentahapan Pengembangan Drainase Perkotaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan



Target layanan drainase sesuai kondisi genangan seluas 995,67 ha yaitu berkurangnya genangan 81% pada tahun 2021 dan tidak terjadinya genangan 2 kali dalam setahun. Pencapaian akan dilakukan secara bertahap dengan prioritas penanganan berdasarkan area berisiko sanitasi drainase. (Lihat Tabel 3.4. Tahapan Pengembangan Drainase Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)

Tabel 3.4.
Tahapan Pengembangan Drainase Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No	Titik Genangan di Area Permukiman	Luas Genangan Eksisting di Area Permukiman (ha)	Pengurangan Luas Genangan (ha)		
			Jangka pendek (s/d 2017)	Jangka menengah (s/d 2021)	Jangka panjang (s/d 2025)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	Salongo	29	29	0	0
2	Toluaya	12	12	0	0
3	Tolondadu I	20	15	5	0
4	Tolondadu	9	9	0	0
5	Sondana	8	8	0	0
6	Tabilaa	18	11	7	0
7	saibuah	15	8	7	0
8	Luwoo	20	12	8	0
9	Linawan	16	10	6	0
10	Nunuk	20	10	10	0
11	Mataindo	46	26	20	0
12	Matandoi	26	15	11	0
13	Dumagin B	16	9	7	0
14	Onggunoi	14	7	7	0
15	Posilagon	16	8	8	0
17	Biniha	20	12	8	0
TOTAL		305	201	104	0

Sumber : Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016

3.2.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

Perumusan tujuan dan sasaran dalam pembangunan sanitasi dirumuskan berdasarkan visi sanitasi yang ingin dicapai dan melaksanakan misi sanitasi yang telah ditetapkan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dan mengatasi permasalahan mendesak yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang dirumuskan untuk mencapai tujuan. Dalam perumusan sasaran digunakan kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time Bound*).

Tujuan pembangunan sektor sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2016–2021 adalah untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten. Selanjutnya, tujuan pembangunan sanitasi memberi arahan serta koridor untuk penetapan sistem dan zona sanitasi termasuk tingkat layanan sanitasi.

3.2.2.1. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Air Limbah Domestik

Pencemaran tinja/kotoran manusia (*feces*) adalah sumber utama dari virus, bakteri, dan patogen lain penyebab diare. Derajat kesehatan dapat dilihat dari Umur Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Angka Kematian Ibu melahirkan, dan Angka Kesakitan/Kematian karena penyakit tertentu serta status Gizi Masyarakat.

Perumahan yang berada di pesisir pantai, dimana kondisi permukaan air tanahnya sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut yang berdampak terhadap sistem pengelolaan air limbah. Tujuan dan sasaran dirumuskan berdasarkan kondisi terkini dan permasalahan yang ada. (*Lihat Tabel 3.5. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Air Limbah Domestik*)

Tabel 3.5.
Tujuan dan Sasaran Pengembangan Air Limbah Domestik

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan kualitas lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat	Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Stop BABS di tahun 2021	Masyarakat yang masih melakukan praktik BABS sebesar 38,2%
	100% penduduk memiliki jamban pribadi	Masyarakat yang memiliki jamban pribadi sebesar 42,86%
	Jamban pribadi memiliki tangki septik yang sesuai syarat kesehatan meningkat sebesar 30%	Tangki septik suspek aman sebesar 23,27%
	Terbangunnya pengelolaan air limbah sistem off-site melayani 1.500 KK untuk kawasan permukiman padat	IPAL Komunal 23 Unit melayani 1000 KK
	Tingkat pencemaran berkurang sebesar 30%	Pencemaran karena SPAL sebesar 49,30%
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah	80% masyarakat yang lebih berperan aktif dalam pengelolaan air limbah	
Mengembangkan alternatif sumber pendanaan dalam sistem pengelolaan air limbah	Pendanaan sanitasi dari APBD Kabupaten mencapai 1,30% pada tahun 2021	Proporsi anggaran APBD murni sanitasi terhadap belanja langsung sebesar 0,31%
	Pihak swasta dan lembaga donor berkontribusi dalam pengelolaan air limbah	Belum ada pihak swasta dan lembaga donor yang terlibat dalam pengelolaan air limbah

Meningkatkan kinerja kelembagaan dalam pengelolaan air limbah	SKPD terkait memiliki kemampuan yang baik dalam pengelolaan air limbah	SKPD yang menangani Dinas PU Cipta Karya dan Badan Lingkungan Hidup
	Tersusunnya regulasi yang secara khusus mengatur mengenai pengelolaan air limbah	Belum adanya peraturan daerah yang berkaitan dengan air limbah. Sementara proses

Sumber : Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2016

3.2.2.2. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Persampahan

Prasarana dan sarana dasar persampahan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada dasarnya sudah melayani seluruh Kabupaten tetapi masih belum optimal, hal ini disebabkan karena terbatasnya Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) persampahan yang ada. Prasarana dasar yang ada yaitu: TPA di Desa Pinolantungan, armada sampah berupa Arm Roll dan Dump Truck, TPS 3R di Desa Molibagu serta TPS di tiap Desa. Dalam mengatasi permasalahan sub sektor persampahan membutuhkan strategi dan usaha-usaha yang lebih konkrit dalam menangani persampahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan merumuskan tujuan yang dicapai dengan lebih tepat sasaran. (Lihat Tabel 3.6. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Persampahan)

Tabel 3.6.

Tujuan dan Sasaran Pengembangan Persampahan

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
(1)	(2)	(3)
Mengurangi volume timbulan sampah ke TPA Pinolantungan	Sampah yang terangkut ke TPA Pinolantungan sebesar 85,00% pada tahun 2021 dan bertambahnya angkutan 10 unit Dump truk dan 5	Sampah yang terlayani dan diangkut mencapai 17,49% dengan Dump Truck tersedia 1 Unit dan 9 unit motor sampah

	Am roll truk	
	Fasilitas reduksi sampah mencapai 15% pada tahun 2021	TPS 3R di Desa Molibagu Kecamatan Bolaang Uki
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga	Terbentuknya kelompok masyarakat yang mengelola sampah secara terpadu	Kelompok pengelola sampah dengan konsep 3R tidak aktif
	Timbulan sampah dari sumbernya berkurang sampai 20% dengan penerapan konsep 3R	Pengolahan sampah yang dibakaar 70%, dibuang disungai, laut 8,5%, dibuan di kebun 12,5%
	Pihak swasta dan lembaga donor berkontribusi dalam pengelolaan persampahan	Pihak swasta yang telah berpartisipasi yaitu perbankan, pertamina dan LSM di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Meningkatkan kinerja kelembagaan dalam pengelolaan persampahan	SKPD terkait memiliki kemampuan yang baik dalam pengelolaan persampahan	SKPD yang menangani BLH
	Tersusunnya Perda yang mengatur mengenai pengelolan TPA	Belum adanya perda Tentang Pengelolaan Persampahan

Sumber : Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2016

3.2.2.3. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Drainase

Kondisi topografi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang unik, yaitu bagian Utara merupakan daerah perbukitan dan bagian Selatan merupakan daerah pantai yang sangat landai menyebabkan sistem pembuangan air hujan terpusat di bagian Selatan. Hal ini menyebabkan daerah Selatan yang

merupakan daerah pusat kegiatan perdagangan dan keramaian pada saat musim hujan sering terjadi genangan sesaat, terutama pada saat air laut dalam kondisi pasang sehingga air buangan yang berasal dari darat tidak bisa mengalir ke laut. Dengan kondisi tersebut, Pokja Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merumuskan tujuan dan sasaran pengembangan drainase perKabupatenan. (Lihat Tabel 3.7. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Drainase Perkotaan)

Tabel 3.7.
Tujuan dan Sasaran Pengembangan Drainase

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan fungsi drainase	Berkurangnya luas genangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dari 305 ha menjadi 104 ha pada akhir tahun 2021	Luas genangan sebesar 995 Ha. Dimana sebagian besar dipengaruhi oleh pasang surut
	Tersusunnya Perda tentang pengelolaan sistem drainase	Belum ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sistem drainase
Meningkatkan kualitas lingkungan dengan pola pemberdayaan masyarakat	Mengembalikan fungsi drainase sebagai pembuangan limbah air hujan	Penyempitan penampang drainase di jalan utama yang disebabkan oleh sedimentasi maupun tumpukan sampah

Sumber: Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2016

3.2.3. Skenario Pencapaian Sasaran

Skenario pencapaian sasaran dalam pengelolaan air limbah, sebagai salah satu rujukan adalah peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 16/PRT/M/2008

tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman dalam rangka kesesuaian percepatan pembangunan strategi sanitasi nasional. Di dalam pencapaian tersebut telah ditentukan wilayah prioritas pengembangan sistem pengelolaan air limbah secara umum dengan sistem *on-site* maupun sistem *off-site*. Kriteria yang dipergunakan antara lain dalam penentuan prioritas pengembangan tersebut antara lain: Kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah (urban high, urban medium, urban low, peri urban, dan rural), karakteristik tata guna lahan/ Central of Business Development (CBD) serta Resiko Kesehatan Lingkungan.

Selanjutnya dari kriteria tersebut di atas kemudian dibuat suatu peta layanan yang menggambarkan kebutuhan pilihan sistem pengelolaan air limbah. Peta tersebut terbagi ke dalam beberapa zona, sekaligus sebagai dasar pengembangan perencanaan jangka panjang pengelolaan air limbah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Target pencapaian akses air limbah domestik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2021 adalah 93,57% akses layak dan 6,43 % akses dasar dimana pengembangan sistem *on-site* sebesar 89% dan sistem *off-site* 9%.

Berdasarkan kriteria yang ada dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), wilayah pengembangan pelayanan persampahan dapat diidentifikasi. Ada 2 (dua) kriteria utama dalam penetapan prioritas penanganan persampahan saat ini yaitu; 1). Tata guna lahan/klasifikasi wilayah : komersial/ Central of Business Development (CBD), pemukiman, fasilitas umum, terminal, dsb; 2). Kepadatan penduduk. Skenario pencapaian sasaran pengelolaan persampahan lebih fokus kepada pengurangan volume sampah yang diangkut ke TPA dengan dikembangkannya fasilitas reduksi sampah.

Lingkup area perencanaan saluran drainase merupakan wewenang dan tanggung jawab Kabupaten. Tetapi, keterkaitannya dengan sistem yang lebih luas di atasnya maka dipandang perlu dintegrasikan dengan Pemerintah Provinsi, Pusat, atau institusi yang bertanggung jawab atas daerah aliran sungai (DAS) terkait. Pencapaian sasaran pada tahun 2021 berkurangnya area genangan hingga 0%. (*Lihat Tabel 3.8. Skenario Pencapaian Sasaran*)

Tabel 3.8.
Skenario Pencapaian Sasaran

Komponen	Tahun						
	2011	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Air Limbah Domestik	60%	68%	72%	77%	82%	90%	93,5%
Persampahan	50%	60%	70%	75%	85%	95%	100%
Drainase	70%	50%	40%	30%	20%	5%	0%

Sumber: Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2016

3.3. Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah

Faktor penting lain yang sangat menentukan penentuan sistem dan cakupan pelayanan sanitasi adalah faktor pembiayaan yang sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan kebutuhan dan merujuk pada dokumen APBD 5 tahun terakhir, maka Pokja Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melakukan proyeksi dan perhitungan tentang pendanaan sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 5 tahun kedepan.

Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran jelas mengenai kemampuan daerah dalam pendanaan sanitasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam dokumen ini. Untuk mendapatkan gambaran tersebut, maka analisis difokuskan pada aspek belanja dalam APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Perkiraan kebutuhan pendanaan sanitasi untuk tahun 2016-2021 diproyeksikan berdasarkan asumsi bahwa proses pembangunan sanitasi diupayakan mengalami percepatan dengan indeks kenaikan proporsi anggaran mengikuti rata-rata progres pertumbuhan yang terjadi dalam kurun waktu masa penganggaran tahun 2010-2015. Dalam masa penganggaran tahun 2010-2015, pertumbuhan rata-rata belanja APBD murni untuk sanitasi mencapai 31,68%. Pertumbuhan pendanaan yang tinggi tersebut diakibatkan adanya kenaikan anggaran yang cukup besar pada tahun 2011 dengan proporsi anggaran APBD

murni sanitasi terhadap belanja langsung sebesar 2,75%. Untuk mencapai percepatan pembangunan sanitasi, perkiraan besaran komitmen pendanaan sanitasi tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 mencapai Rp. 52.233.500.000. *(Lihat Tabel 3.9. Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk Sanitasi dan Tabel 3.10. Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan)*

Proyeksi kenaikan APBD murni terhadap sanitasi didasari pada pertumbuhan pengalokasian anggaran sanitasi 5 tahun terakhir dari belanja langsung APBD. Berdasarkan alokasi anggaran sanitasi diperkirakan besaran pendanaan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk kebutuhan operasional/pemeliharaan aset sanitasi terbangun hingga tahun 2021 tiap sub sektor. Dimana, total perkiraan kebutuhan operasional/pemeliharaan sesuai aset sanitasi terbangun Rp.5.502.600.000. *(Lihat Tabel 3.11. Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk Operasional/Pemeliharaan Sanitasi dan Tabel 3.12. Perkiraan besaran pendanaan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk kebutuhan operasional/pemeliharaan aset sanitasi terbangun hingga tahun 2021)*

Kemampuan daerah untuk berkomitmen dalam penganggaran sanitasi diproyeksikan 1,30% pada tahun 2021 dari belanja langsung Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Salah satu strategi Pokja Sanitasi dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan sanitasi adalah mencari alternatif sumber pendanaan diluar APBD Kabupaten. *(Lihat Tabel 3.13. Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK)*

Tabel 3.9.
Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)			
		2012	2013	2014	2015
1	Belanja Sanitasi (1.1+1.2+1.3)	111.630.360.000	13.165.245.000	151.521.555.000	247.944.426.600
1.1	Air Limbah Domestik	101.669.500.000	5.300.000.000	142.300.000.000	237.500.000.000
1.2	Sampah Rumah Tangga	334.750.000	650.000.000	650.000.000	700.000.000
1.3	Drainase	9.626.110.000	7.215.245.000	8.571.555.000	9.744.426.600
2	Dana Alokasi Khusus (2.1+2.2+2.3)	111.000.000.000	7.113.260.000	151.184.100.220	247.459.625.000
2.1	DAK Sanitasi	111.000.000.000	7.113.260.000	150.976.100.220	242.529.600.000
2.2	DAK Lingkungan Hidup	0	0	208.000.000	615.200.000
2.3	DAK Perumahan dan Permukiman	0	0	0	4.314.825.000
3	Pinjaman/Hibah Untuk Sanitasi	0	0	0	0
Belanja APBD Murni Untuk Sanitasi (1-2-3)		630.360.000	6.051.985.000	337.454.780	484.801.600
Total Belanja Langsung		362.918.328.050	364.238.917.679	314.246.787.330	351.342.263.300
% APBD Murni Terhadap Belanja Langsung		0,17	1,66	0,11	0,14
Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai)					

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun 2010–2015, Bappeda

Tabel 3.10.
Perkiraan Besaran Sanitasi Ke Depan

No	Uraian	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.)			
		2017	2018	2019	2020
1	Perkiraan Belanja Langsung	3.290.780.000	6.900.000.000	5.648.000.000	7.500.000.000
2	Perkiraan APBD Murni Untuk sanitasi	7.800.500.000	9.900.500.000	10.600.500.000	11.500.500.000
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	7.469.764.000	9.481.500.000	10.341.500.000	11.201.500.000

Sumber: Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016

Tabel 3.11.
Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk Operasio

No	Uraian	Belanja (Rp.)			
		2011	2012	2013	2014
1	Belanja Sanitasi				
1.1	Air Limbah Domestik				
1.1.1	Biaya Operasional/Pemeliharaan (justified)	50.834.750	2.650.000	71.150.000	118.750.000
1.2					
1.2.1	Biaya Operasional/Pemeliharaan (justified)	10.042.500	19.500.000	19.500.000	21.000.000
1.3					
1.3.1	Biaya Operasional/Pemeliharaan (justified)	48.130.550	36.076.225	42.857.775	48.722.133

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2010-2015, Bappeda

Tabel 3.12.
Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk Kebutuhan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2021

No	Uraian	Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp.)			
		2017	2018	2019	2020
1	Belanja Sanitasi				
1.1	Air Limbah Domestik				
1.1.1	Biaya Oprasional/Pemeliharaan (<i>justified</i>)	373.450.000	492.050.000	517.050.000	560.050.000
1.2	Sampah Rumah Tangga				
1.2.1	Biaya Oprasional/Pemeliharaan (<i>justified</i>)	305.750.000	334.560.000	363.600.000	395.540.000
1.3	Drainase				
1.3.1	Biaya Oprasional/Pemeliharaan (<i>justified</i>)	203.400.000	213.600.000	224.250.000	235.450.000

Sumber : Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016

Tabel 3.13.
Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK

Uraian	Pendanaan (Rp.)					Total Pendanaan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Perkiraan Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan	882.600.000	1.040.210.000	1.104.900.000	1.191.040.000	1.283.850.000	5.502.600.000
Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	7.800.500.000	9.900.500.000	10.600.500.000	11.500.500.000	12.421.500.000	52.233.500.000
Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	7.469.764.000	9.481.500.000	10.341.500.000	11.201.500.000	12.061.500.000	50.555.674.000
Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)	6.917.900.000	8.860.290.000	9.495.600.000	10.309.460.000	11.137.650.000	46.720.900.000
Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)	6.587.164.000	8.441.290.000	9.236.600.000	10.010.460.000	10.777.650.000	45.053.164.000

Sumber: Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016

BAB 4

STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Perumusan strategi dalam percepatan pembangunan sanitasi menggunakan SWOT sebagai alat bantu, dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada tiap sub-sektor sanitasi berdasarkan isu strategis. Strategi adalah cara untuk mencapai visi dan misi yang dirumuskan berdasarkan kondisi saat ini. Dimana, akan memaparkan strategi utama dari setiap komponen sanitasi.

4.1. Air Limbah Domestik

Strategi untuk mencapai visi sanitasi dan melaksanakan misi sanitasi, dirumuskan berdasarkan kondisi terkini dari pengelolaan air limbah domestik dimana strategi yang digunakan adalah mengatasi kelemahan untuk meraih peluang.

Strategi 1: Memaksimalkan pembuatan dokumen pengelolaan air limbah yang terintegrasi dengan didukung oleh peraturan pemerintah daerah.

Perlunya dokumen perencanaan air limbah merupakan kebijakan daerah tentang pengelolaan air limbah, tentunya sangat mendukung pencapaian tujuan meningkatkan kinerja kelembagaan dalam pengelolaan air limbah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah.

Program air limbah sekarang menjadi isu sentral menuju pada target *Universal Access* cakupan akses sanitasi 100%. Kebijakan Teknis Infrastruktur tercantum pada Tupoksi SKPD Dinas PU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terutama pembangunan prasarana air limbah baik pemberdayaan maupun non pemberdayaan. Namun, harus didukung dengan dokumen perencanaan air limbah yang terpadu dengan tersedianya master plan air limbah.

Strategi 2: Meningkatkan dan membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang layak

Didalam kehidupan sehari-hari bukan menjadi rahasia umum bahwa Praktik buang air besar sembarangan (BABS) berkisar 60% menjadi tantangan tersendiri

bagi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat seiring tingginya pencemaran terhadap lingkungan. Kepemilikan jamban pribadi yang berdampak kepada praktik buang air besar sembarangan memberikan dorongan untuk membangun akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana air limbah yang memenuhi standar kesehatan.

Strategi 3 : Mengoptimalkan kordinasi dan kerjasama kelembagaan dalam memelihara prasarana air limbah yang sudah ada dan yang akan dibangun

Satuan Kerja Perangkat daerah terkait memiliki kemampuan yang baik dalam pengelolaan air limbah dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Permukiman Prasarana Wilayah untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dalam pengelolaan air limbah. Dan tentunya sangat berkaitan dengan peraturan daerah yang saat ini masih dalam proses pembahasan.

Strategi 4 : Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman

Perlunya pengembangan dalam peningkatan pengelolaan air limbah permukiman dengan bantuan dari pihak yang terkait (stakeholder) untuk mendorong masyarakat membangun sarana dan prasarana air limbah di permukiman masyarakat

Strategi 5 : Mendayagunakan dan meningkatkan peran serta masyarakat dan pihak swasta serta lembaga yang sudah berpartisipasi selama ini ataupun yang belum pernah terlibat

Masalah air limbah bukan saja hanya menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, akan tetapi menjadi tanggungjawab bersama didalam pengelolaannya. Tantangan kedepan untuk membangun sarana dan prasarana air limbah juga menjadi tanggungjawab masyarakat, swasta dan pemerintah (pemangku kepentingan) berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, nyaman sebagai daerah Religius menjadi cerminan kota yang bersahaja.

4.2. Pengelolaan Persampahan

Dalam pengelolaan persampahan, maka strategi yang akan dikembangkan yaitu bagaimana menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Dimana, membutuhkan strategi dan usaha-usaha yang lebih konkrit dalam menangani persampahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Ada 6 strategi yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam pengelolaan persampahan.

Strategi 1: Memaksimalkan pembuatan dokumen pengelolaan persampahan yang terintegrasi dengan didukung oleh peraturan daerah.

Kegiatan penanganan persampahan menjadi hal serius yang dihadapi dalam pengelolaan persampahan dimana implementasinya sesuai dengan cakupan tentang pengelolaan persampahan. Ketersediaan kebijakan daerah tentang pengelolaan persampahan sangat mendukung pencapaian tujuan meningkatkan kinerja kelembagaan dalam pengelolaan persampahan.

Belum adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan persampahan sehingga berdampak pada manajerial pengolahan sampah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Strategi 2 : Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan termasuk pemahaman konsep 3R.

Proses pengolahan setempat cenderung membuang sampah disembarang tempat dan melakukan pembakaran sampah secara terbuka, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dengan memberikan bimbingan pengolahan sampah konsep 3R adalah salah satu upaya untuk mengurangi timbulan sampah dari sumbernya.

Strategi 3 : Membangun fasilitas reduksi sampah yang berasal dari rumah tangga, pasar dan terminal.

Peningkatan laju timbulan sampah pertahun sangat berdampak pada kapasitas dan umur rencana TPA, mengurangi volume timbulan sampah ke TPA

Pinolantungan merupakan salah satu tujuan dalam strategi sanitasi kota tahun ini. Pengembangan fasilitas reduksi sampah dengan bangunan 3R dinilai belum efektif, perlu adanya sosialisasi dan tindak lanjut agar TPS 3R dapat berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat terutama masyarakat yang ada disekitar TPS 3R Di Desa Molibagu dengan Kelompok yang sudah terbentuk KSM Tiga Raya untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Strategi 4 : Mengefektifkan peran kelembagaan dan meningkatkan kinerja dalam memelihara sarana dan prasarana yang sudah ada dan yang akan dibangun.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja melalui Tupoksi SKPD, manajemen teknis dan OM kelembagaan berupa pelatihan dan bimbingan. Tuntutan peningkatan kapasitas dari sejumlah kelembagaan pembangunan seperti PKK, Posyandu dan Karang Taruna agar bisa mengimbangi permasalahan dalam pengelolaan persampahan yang semakin dinamis dan kompleks. Selain itu keterlibatan perempuan perlu ditingkatkan yang merupakan pemanfaat sektor sanitasi yang dominan, diantaranya melalui pemberdayaan perempuan dengan mendorong terbentuknya pemberdayaan KSM perempuan.

Strategi 5 : Mengoptimalkan sumber pendanaan baik pemerintah maupun swast dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan di kabupaten

Dalam pelaksanaan kegiatan persampahan tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak didukung dengan anggaran, Perlunya mengoptimalkan sumber pendanaan baik melalui APBN maupun APBD untuk peningkatan sarana prasarana persampahan

Strategi 6 : Mengefektifkan dan meningkatkan kerjasama kelembagaan dalam pengelolaan persampahan.

Keterlibatan pihak swasta Bank SulutGo dan Bank Rakyat Indonesia dalam pengelolaan persampahan memberikan dukungan dalam proses penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pembangunan sanitasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pemerintah dapat memfasilitasi antara pemilik modal perbankan dan pihak swasta lainnya dengan para pelaku atau peminat bisnis dalam pengelolaan persampahan. Selain fungsi fasilitasi, mencari sumber pendanaan lain berupa dana sosial dari pihak swasta perlu ditingkatkan.

4.3. Drainase Perkotaan

Secara internal, pengelolaan drainase Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih memerlukan perbaikan, meskipun resiko genangan relatif kecil. Strategi yang harus dilaksanakan adalah mengatasi kelemahan untuk mengantisipasi setiap ancaman. Dengan uraian kondisi tersebut, maka Pokja Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah merumuskan beberapa strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi 1: Memaksimalkan pembuatan dokumen perencanaan drainase yang terintegrasi dengan didukung oleh peraturan pemerintah daerah.

Secara topografi daerah kawasan permukiman di Kabupaten Bolaang Mngondow Selatan berada dipinggiran pantai. Hal ini menjadi penyebab adanya genangan air akibat pasang surut. Dengan demikian perlunya arahan pola dan tata ruang pengelolaan drainase yang baik. Pada prinsipnya perlu di implementasikan menjadi produk hukum dan perundang-undangan, seperti kebijakan tentang pelarangan penggunaan pembangunan di atas drainase, pembuangan sampah kedalam drainase, dan lalulintas kendaraan berat yang dapat merusak struktur bangunan drainase dan dengan adanya dokumen perencanaan drainase seperti master plan drainase, sistem drainase menjadi sebuah satu kesatuan antara wilayah pengunungan dan wilayah dataran rendah sehingga dapat meningkatkan fungsi drainase untuk mengatasi genangan.

Strategi 2: Meningkatkan Pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase sesuai fungsi dan memperhatikan kondisi lingkungan

Terjadinya pendangkalan dan penyempitan jaringan drainase makro akibat laju erosi permukaan dan sedimentasi yang berakibat penyusutan penampungan air di saluran drainase dan kondisi konstruksi drainase yang merupakan kontruksi bangunan lama sehingga ada beberapa bangunan drainase yang sudah rusak menuntut pembangunan dan pemeliharaan drainase secara rutin.

Strategi 3: Mensinergikan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sistem drainase

Tupoksi mengenai pengelolaan drainase pada Dinas PU berada pada Bidang Cipta Karya, memiliki peran penting dalam pengelolaan sistem drainase disamping itu keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan drainase perlu ditingkatkan dengan pola pemberdayaan masyarakat. Dimana, komponen sampah padat akibat perilaku masyarakat itu sendiri dengan membuang sampah dan limbah lainnya yang dapat mengurangi daya alir air sesuai kapasitas normal dan jika terjadi hujan maka drainase menjadi tersumbat. Dengan keterlibatan masyarakat, kelompok masyarakat, pihak swasta, dan pihak dinas PU bersama-sama menjadi pioner dalam memelihara dan merawat drainase sesuai dengan fungsi dan penggunaannya.

Strategi 4 : Mendorong dan Meningkatkan kesadaran peran masyarakat dan swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan drainase

Pola pikir masyarakat sampai saat ini masih beranggapan bahwa kegiatan pembangunan drainase adalah tanggungjawab dari Pemerintah Daerah. Cara pandang seperti itu perlu diubah, bahwa mengenai genangan air dan pengendaliannya adalah tanggungjawab bersama. Masyarakat yang terlibat langsung perlu menyadari bahwa kegiatan ini perlu dukungan dari segala pihak terutama partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Strategi 5 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana drainase

Pembangunan drainase tidak saja dipandang sebelah mata saja, artinya tidak saja dibuatkan saluran yang penting air limbah atau limpahan air hujan bias mengalir ke badan air. Akan tetapi pelunya penanganan yang baik agar sarana dan prasarana drainase benar-benar diperhatikan baik kualitasnya maupun dari segi kuantitas agar tidak ada lagi wilayah-wilayah yang tergenang.

BAB 5

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

5.1. Ringkasan

Program dan kegiatan percepatan pembangunan sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disusun untuk mengatasi masalah sanitasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam 5 tahun ke depan. Indikasi kebutuhan biaya dan sumber pendanaan pengembangan sanitasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah sebesar Rp.464.193.000.000 dengan porsi pendanaan lebih besar dibebankan pada sub sektor air limbah domestik yaitu sebesar Rp.82.462.000.000 sebagai prioritas penanganan utama. (Lihat Tabel 5.1. Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun).

Tabel 5.1.
**Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya
Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun**

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran (x Rp. 1 Juta)					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Limbah Domestik	24.931	12.952	13.797	15.292	16.292	82.462
2	Persampahan	8.485	6010	6.693	6.049	7.061	34.287
3	Drainase	18.362	4.672	4.885	5.109	4.944	37.932
Jumlah (a)		51.778	23.633	25.374	26.450	27.496	154.731
Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi (b)		7.800,5	9.900,5	10.600,5	11.500,5	12.421,5	52.224
Perkiraan Komitmen Pendanaan sanitasi (c)		7.469,8	9.481,5	10.341,5	11.201,5	12.061,5	50.556
Gap 1 (a – b)		43.977,5	13.732,5	14.773,5	14.949,5	15.074,5	102.508
Gap 2 (a – c)		44.308,2	14.151,5	15.032,5	15.248,5	15.434,5	104.175
Jumlah		155.334	70.899	76.122	79.350	82.488	464.193

Sumber : Hasil Analisa Pokja Sanitasi Tahun 2016 dan Renstra Kabupaten

Pendanaan yang bersumber dari pemerintah yaitu APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN kebutuhan anggaran sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar Rp.143.873.000.000 hingga tahun 2021. Peran swasta (CSR) dan masyarakat dalam pendanaan pengembangan sanitasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan hingga 5 tahun kedepan sebesar Rp.2.020.000.000. (Lihat Tabel 5.2. Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun per Sumber Anggaran).

**Tabel 5.2.
Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya
Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun per Sumber Anggaran**

No.	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran (x Rp. 1 Juta)					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
A.	Pemerintah						
1	APBD Kota	49.228	17.685	18.444	19.886	20.085	125.328
2	APBD Provinsi	500	0	425	0	550	1.475
3	APBN	1.900	4.090	3.990	3.300	3.790	17.070
	Jumlah A	51.628	21.775	22.859	23.186	24.425	143.873
B.	Non-Pemerintah						
1	CSR Swasta	0	0	0	500	800	1.300
2	Masyarakat	300	70	200	80	70	720
	Jumlah B	300	70	200	580	870	2.020
	Total (A + B)	51.928	21.845	23.059	23.766	25.295	145.893

Sumber : Hasil Analisa Pokja Sanitasi Tahun 2016

5.2. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Dengan Sumber Pendanaan Pemerintah

5.2.1. APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Penganggaran sanitasi yang bersumber dari APBD Kota hingga tahun 2021 sebesar Rp.122.828.450.000. Dimana, proporsi penganggaran paling besar pada sub sektor air limbah Rp.72.717.000.000. Penganggaran sanitasi paling besar dari APBD Kota dalam 5 tahun sebesar Rp.49.228.000.000 di tahun 2017. (Lihat Tabel 5.3. Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)

Tabel 5.3.
Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran (x Rp. 1 Juta)					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Limbah Domestik	23.881	11.431,5	11.721,5	12.761,5	12.921,5	72.717
2	Persampahan	6.985	1.031,75	1.188,0	1.365,0	1.569,7	12.139,45
3	Drainase	18.362	4.672	4.885	5.109	4.944	37.972
Jumlah		49.228	17.135,3	17.794,5	19.235,5	19.435,2	122.828,45

Sumber : Hasil Analisa Pokja Sanitasi Tahun 2016 dan Renstra Kabupaten

5.2.2. APBD Provinsi

Kebutuhan biaya yang bersumber dari APBD Provinsi untuk pembangunan sanitasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam jangka waktu 5 tahun adalah Rp.5.425.000.000. Dimana, untuk sub sektor persampahan pendanaan APBD Provinsi dialokasikan untuk kegiatan pembangunan TPS 3R dan kendaraan pengangkut sampah ke TPA dan sub sektor drainase untuk peningkatan saluran drainase. (Lihat Tabel 5.4. Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi)

Tabel 5.4.
Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran (x Rp. 1 Juta)					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Limbah Domestik	500		425	0	550	1.475
2	Persampahan	0	0	0	0	0	0
3	Drainase	0	0	0	0	0	0
Jumlah		500	0	425	0	550	1.475

Sumber : Hasil Analisa Pokja Sanitasi Tahun 2016

5.2.3. APBN

Pendanaan yang bersumber dari APBN hingga tahun 2021 adalah sebesar Rp.17.070.000.000 dengan pendanaan sub sektor air limbah domestik sebesar Rp.7.400.000.000, sub sektor persampahan Rp.9.670.000.000, dan sub sektor drainase sebesar Rp.0. Berdasarkan tahapan pengembangan air limbah akan dikembangkan sistem instalasi pengelolaan air limbah (IPAL KOMUNAL) (Lihat Tabel 5.5. Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBN).

Tabel 5.5.
Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBN

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran (x Rp. 1 Juta)					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Limbah Domestik	400	1.500	1.500	2.000	2.000	7.400
2	Persampahan	1.500	2.590	2.490	1.300	1.790	9.670
3	Drainase	0	0	0	0	0	0
Jumlah		1.900	4.090	3.990	3.300	3.790	17.070

Sumber : Hasil Analisa Pokja Sanitasi Tahun 2016

5.3. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah

5.3.1. Swasta/CSR

Peran swasta/CSR dalam pendanaan pengembangan sanitasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan hingga tahun 2021 sebesar Rp.1.300.000.000. Peran swasta dalam 5 tahun terakhir lebih berperan dalam penyediaan sarana persampahan. Sampai tahun 2021, pihak swasta/CSR akan berpartisipasi dalam subsektor air limbah. (Lihat Tabel 5.6. Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR)

Tabel 5.6.
Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran (x Rp. 1 Juta)					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Limbah Domestik	0	0	0	500	800	1300
2	Persampahan	0	0	0	0	0	0
3	Drainase	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	500	800	1300

Sumber : Hasil Analisa Pokja Sanitasi Tahun 2016

5.3.2. Masyarakat

Peran masyarakat dalam pendanaan pengembangan sanitasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan hingga 5 tahun kedepan sebesar Rp.720.000.000. (Lihat Tabel 5.7 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Masyarakat)

Tabel 5.7.
Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran (x Rp. 1 Juta)					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Limbah Domestik	250	20	150	30	20	470
2	Persampahan	50	50	50	50	50	250
3	Drainase	0	0	0	0	0	0
Jumlah		300	70	200	80	70	720

Sumber : Hasil Analisa Pokja Sanitasi Tahun 2016

5.4. Antisipasi Funding Gap

Kemungkinan terjadinya Funding Gap bila jumlah anggaran yang dibutuhkan jauh lebih besar daripada yang tersedia. Gap dalam 5 tahun sebesar 9,27% dari total kebutuhan pendanaan sanitasi, dimana pada tahun 2017 Gap mencapai 28,20%. (Lihat Tabel 5.8. Funding Gap)

Tabel 5.8.
Funding Gap

No.	Uraian	Tahun Anggaran (x Rp. 1 Juta)					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Limbah Domestik	0	125	1.085	60	60	1.330
2	Persampahan	0	575	630	20	0	1.225
3	Drainase	0	0	3.150	0	0	3.150
4	Daftar Tunggu (Funding Gap)	0	700	4865	80	60	5.705
5	Kebutuhan Pendanaan Sanitasi	51.778	23.633	25.374	26.450	27.496	154.731
6	Gap (%)	0	2,96	19,17	0,30	0,22	3,69

Sumber : Hasil Analisa Pokja Sanitasi Tahun 2015

BAB 6

MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Monitoring adalah suatu cara untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai atau sedekat mungkin dengan rencana serta menggunakan sumber daya secara tepat. Evaluasi adalah penilaian tentang bagaimana program dijalankan, apakah proses dan dampaknya sudah sesuai dengan yang diharapkan, menelaah faktor-faktor penghambat yang dihadapi dan faktor-faktor pendukung yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, monitoring dan evaluasi adalah kegiatan untuk memeriksa, mengawasi, dan menilai jalannya program mulai dari tahap sosialisasi dan orientasi awal, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga pada kegiatan penyelesaian pembangunan fisik dan pemeliharannya.

Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai bagian dalam Perencanaan Strategi Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk mengetahui sejauh mana batasan kegiatan dan hasil dari pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota yang telah dicapai berdasarkan tahun kegiatan. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga merupakan kontrol untuk perencanaan program tahun berikutnya dan membahas penyelesaian kegiatan yang tertunda bahkan sebagai data dasar kegiatan dari perencanaan yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tujuan penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, maka tujuan penyusunan strategi monitoring dan evaluasi sanitasi adalah menetapkan kerangka kerja untuk mengukur dan memperbaharui kondisi dasar sanitasi, memantau dampak, hasil dan keluaran dari kegiatan sektor sanitasi kota, untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran sanitasi, rencana pengembangan dan target tertentu sanitasi kota, serta kepatuhan pada standar pelayanan minimum yang ada sudah dilaksanakan secara efektif.

Monitoring dan evaluasi ini perlu dilakukan secara rutin oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hal tersebut dilakukan sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan capaian sasaran pembangunan sanitasi dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati. Kegiatan dalam petunjuk

praktis ini mencakup:

- Menilai ulang kerangka hasil/kerangka SSK seperti tujuan, sasaran, input, kegiatan dan output.
- Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi SSK di tingkat pokja.
- Memasukkan informasi kerangka hasil ke dalam sistem monev berbasis Nawasis PPSP.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, perlu ada keselarasan dan kesesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan yang telah dibuat. Dalam kaitan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian program dari strategi Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan demi menjamin tercapainya tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut yaitu obyektif, profesional, partisipasi, tepat waktu, transparan, akuntabel, berkesinambungan dan berbasis kinerja.

Mekanisme monitoring dan evaluasi kondisi Sanitasi terdiri atas 4 komponen yaitu:

1. Pengumpulan data yang terdiri dari program yang berkaitan dengan sanitasi: kegiatan, lokasi kegiatan, jumlah yang terlibat, sasaran kegiatan dan hasil kegiatan.
2. Analisa data dan Pelaporan yang berisi penggambaran kondisi pelaksanaan Sanitasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu keberhasilannya, dampak dan juga permasalahan yang timbul sehingga dapat dicarikan solusi yang terbaik bagi semua stakeholder.
3. Perencanaan dan pengambilan keputusan untuk rencana tindak lanjut tentang perkembangan program dan kegiatan sanitasi.
4. Tindakan pengimplementasian perencanaan dan keputusan yang telah diambil dari rangkaian tahap tersebut di atas.

Untuk mempersiapkan strategi monitoring evaluasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini maka perlu diperhatikan matriks kerangka logis yang telah disepakati bersama. Dari kerangka logis inilah maka Pokja dapat mengetahui kearah mana dan sampai dimana tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. (Lihat Tabel 6.1. Tabel Capaian Strategis dan Tabel 6.2. Tabel Capaian Kegiatan)

Tabel 6.1
Capaian Strategis

Tujuan :					
Mencapai layanan akses sanitasi bidang air limbah menjadi 100 % (12.255 KK) pada tahun 2019 dengan menyediakan sistem pengolahan sarana dan prasarana air limbah yang memadai					
Tahun 2017					
Rencana			Realisasi		
<p>1. Berkurangnya masyarakat yang BABS di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dari 60% (7.353 kk) menjadi 0% di tahun 2019</p> <p>2. Meningkatnya kepemilikan jamban sehat dari 35,8% (4.387 kk) di Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi 100% di tahun 2021</p> <p>3. Penyediaan layanan penyedotan tinja dari 0% ke 100% di tahun 2019</p>					
Output	Belanja	Outcome	Output	Belanja	Outcome
Pemicuan	55 Juta				
Pembangunan MCK dan IPAL	8.845 juta	Penambahan Akses 130 KK			
Pembangunan IPAL Komunal + SR	7.725 Juta	Penambahan Akses 2000 Jiwa			
Pembangunan tangki septik komunal	1.290 Juta	750 Jiwa			
Penunjang Kegiatan Air Limbah	4.975 Juta				
Penunjang Kegiatan Persampahan	2.850 Juta				

Tabel 6.2
Capaian Kegiatan

Tahun 2017				
Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Realisasi Output	Belanja	Outcome
Pemicuan				
Pembangunan MCK dan IPAL				
Pembangunan IPAL Komunal + SR				
Pembangunan tangki septik komunal				
Penunjang Kegiatan Air Limbah				
Penunjang Kegiatan Persampahan				

Perihal yang terpenting adalah sanitasi merupakan permasalahan bersama dimana sistem monitoring dan evaluasi sanitasi harus terbuka dan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.

Mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan sanitasi untuk mengetahui tercapai atau tidaknya sasaran dari kebijakan sanitasi di tingkat kota, yaitu dengan memonitor pelaksanaan kebijakan oleh berbagai pelaku melalui indikator keluaran dan manfaat serta mengevaluasi hasil-hasilnya melalui indikator dampak sebagai masukan perumusan kembali kebijakan dan program. Pelibatan stakeholders yang penting ada pada evaluasi hasil dan perumusan program sangat mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi. (Lihat Tabel 6.3. Tabel Evaluasi dan Tabel 6.4. Tabel Pelaporan Monev Implementasi SSK)

Tabel 6.3
Evaluasi

Sasaran	Rencana	Realisasi	Deviasi	Penyebab	Rekomendasi
1. Berkurangnya masyarakat yang BABS di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dari 60% (7.353 kk) menjadi 0% di tahun 2019					
2. Meningkatnya kepemilikan jamban sehat dari 35,8% (4.387 kk) di Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi 100% di tahun 2021					
3. Penyediaan layanan penyedotan tinja dari 0% ke 100% di tahun 2019					
12.255 Penduduk tersambung ke sistem sanitasi layak di tahun 2021	12 Kegiatan (24.931 Juta)				

Tabel 6.4
Pelaporan Monev Implementasi SSK

Obyek Pemantauan	Penanggung Jawab			Waktu Pelaksanaan	Pelaporan Penerima Laporan
	Penanggung Jawab Utama	Pengumpul Data dan Dokumentasi	Pengolah Data/Pemantau		
Tabel Capaian Strategis	BAPPEDA	BLH	DINAS PU	Okt - Des tahun Berjalan	Bupati & Kepala SKPD
Tabel Capaian Kegiatan	BAPPEDA	BLH	DINAS PU	Okt - Des tahun Berjalan	Bupati & Kepala SKPD
Tabel Evaluasi	BAPPEDA	BLH	DINAS PU	Okt - Des tahun Berjalan	Bupati & Kepala SKPD